



**PENGARUH KOMITMEN KEPALA DAERAH, PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Oleh :

Pipit Ayuning Pramesti

NPM : 4316500139

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
2020**



**PENGARUH KOMITMEN KEPALA DAERAH, PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**

Skripsi

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti
Tegal

Oleh :

Pipit Ayuning Pramesti

NPM : 4316500139

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pipit Ayuning Pramesti

NPM : 4316500139

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Audit

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
 2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 15 Juli 2020

Yang menyatakan,



Pipit Ayuning Pramesti



PENGARUH KOMITMEN KEPALA DAERAH, PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, AUDIT KINERJA, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Oleh :

Pipit Ayuning Pramesti

NPM : 4316500139

Disetujui Oleh Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M
NIPY/NIP. 15661651980

Dosen Pembimbing II

Maulida Dwi Kartika, SE, M.Si
NIPY/NIP. 21662031989

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Aminul Fajri, S.E., Akt.
NIPY. 1385231970

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pipit Ayuning Pramesti

NPM : 4316500139

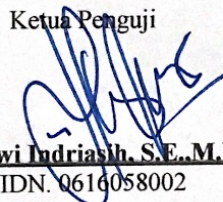
Judul : **Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Juli 2020

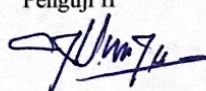
Ketua Penguji


Dr. Dewi Indriasth, S.E., M.M.
NIDN. 0616058002

Penguji I

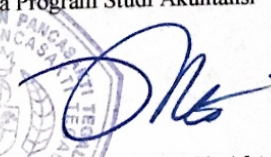

Sumarno, S.E., M.Si
NIDN. 0608016501

Penguji II


Abdulah Mubarak, SE., MM, Akt
NIDN. 0331077302

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt
NIDN. 0602037002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian untuk skripsi dengan judul " **Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal** ".

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Saya sangat menyadari dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini sangat terbantu berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.e., M.M., Akt., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Aminul Fajri, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Maulida Dwi Kartika, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan moril, material, arahan dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini dan seluruh pihak yang membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi penelitian ini belumlah sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Maka dari itu, saya akan menerima kritik dan saran sebagai masukan yang dapat meningkatkan pengetahuan saya. Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dan sempurna dari Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata semoga skripsi penelitian ini dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tegal, 14 April 2020

Pipit Ayuning Pramesti

NPM. 4316500139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Surround yourself with people that push you to do and be better. No drama or negativity. Just higher goals and higher motivation. Simply bringing out the absolute best in each other. ☺

Kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orang tuaku Bapak Rokhim Sudiharjo dan Ibu Anirah Kebanggaanku, Tidak mungkin semua pencapaian yang saya dapatkan sampai saat ini tanpa jasa dan kasih sayang dari mamah dan bapak.
3. Tersayang Riza Hadi Zamzami, yang selalu ada dan menemani dalam pembuatan skripsi ini.
4. Keluarga tersayang Rosiyani, Irma Supana, Adi, dan Ahza yang selalu memberikan *support*.
5. Seluruh sahabatku (Fitri, Indri, Mely, Teman-teman Ukhti Darling, dll)
6. Almamater tercinta UPS Tegal.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS 22. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kabupaten Tegal. Dan penentuan Sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, good governance tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Kata kunci : Komitmen Kepala Daerah, *Good Governance*, Audit Kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas Keuangan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the Commitment of Regional Heads, Implementation of Good Governance, Performance Audit, and Government Accounting Standards on Financial Accountability.

This study uses a quantitative approach, the data collection method used in this study is the questionnaire method. While the analysis of the data used is descriptive analysis, classic assumption test, and hypothesis testing with the help of SPSS 22. The population in this study was the Office of the Inspectorate of Tegal Regency. And determination of samples in this study using the saturated sample method.

The results showed that the variable commitment of the regional head had a positive effect on financial accountability, good governance had a not effect on financial accountability, performance audits had a positive effect on financial accountability, government accounting standards had a positive effect on financial accountability.

Keywords: *Commitment of Regional Head, Good Governance, Performance Audit, Accounting Standars of Government, Financial Accountability.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A...LATAR BELAKANG.....	1
B...RUMUSAN MASALAH	8
C...TUJUAN PENELITIAN	8
D...MANFAAT PENELITIAN.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A...Landasan Teori.....	11
1....Akuntabilitas Keuangan.....	11
2....Komitmen Kepala Daerah.....	17

3.... <i>Good Governance</i>	21
4.... Audit Kinerja.....	26
5.... Standar Akuntansi Pemerintah.....	30
B... Studi Penelitian Terdahulu	36
C... Kerangka pemikiran konseptual	41
D... Hipotesis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A...Jenis Penelitian	49
B...Objek Penelitian	49
1....Populasi.....	49
2....Sampel	50
C...Definisi konseptual dan Operasionalisasi Variabel.....	50
1....Definisi Konseptual.....	50
2....Operasional Variabel.....	54
D...Metode Pengumpulan Data.....	58
E... Uji Instrumen Penelitian	59
F... Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	61
1.... Analisis Statistik Deskriptif.....	61
2.... Uji Asumsi Klasik.....	62
3.... Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
4.... Uji Hipotesis.....	66

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	69
A...Deskripsi Obyek Penelitian	69
B...Deskripsi Data	78
C...Pengujian Instrumen Data	85
1....Uji Validitas.....	84
2....Uji Reabilitas.....	85
D...Uji Asumsi Klasik	89
1....Uji Normalitas.....	89
2....Uji Multikolinearitas.....	90
3....Uji Heterokedastisitas.....	90
E...Analisis Data	91
1....Uji Regresi Linear Berganda.....	91
2....Uji Ketetapan Model.....	93
a....Uji Statistik t (Uji Parsial)	93
b....Uji R ² (Uji Koefisien Determinasi)	96
F... Pembahasan Hasil Penelitian	97
BAB V PENUTUP.....	102
A...Kesimpulan	102
B...Saran	102
C...Keterbatasan Peneliti	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tugas Pokok dan Fungsi	73
Tabel 4.2 Karakteristik Data Kuesioner.....	78
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden.....	79
Tabel 4.4 Usia Responden.....	79
Tabel 4.5 Pendidikan Responden.....	80
Tabel 4.6 Lama Bekerja Responden.....	80
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	82
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.....	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas.....	86
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	88
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	89
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	91
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t).....	94
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	96

DAFTAR GAMBAR

A...Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	49
B...Gambar 4.1 Peta Lokasi Kantor Inspektorat Kab. Tegal.....	69
C...Gambar 4.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tegal.....	73
D...Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Tabulasi Data Kuesioner

Lampiran 3 Statistik Deskriptif

Lampiran 4 Hasil Uji Validitas

Lampiran 5 Hasil Uji Reabilitas

Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Lampiran 8 Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 9 Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial)

Lampiran 10 Hasil Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia perkembangan Akuntansi Sektor Publik semakin pesat dengan adanya sebuah era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Cara pengelolaan daerah sangat berpengaruh terhadap nasib suatu daerah, semakin baik pengelolaan daerah tersebut maka daerah akan semakin maju. Di era reformasi ini akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat dikarenakan praktek korupsi yang sering terjadi. Praktek kecurangan seperti korupsi dapat diminimalisir oleh keakuntabilitan sebuah laporan dan perkembangan Akuntansi Sektor Publik. Pengelolaan keuangan daerah yang memiliki akuntabilitas baik maka aset daerah akan tetap terjaga keutuhannya (Rinaldi, 2016).

Akuntabilitas Keuangan merupakan sebuah pengungkapan, integritas keuangan serta ketaatan sebuah organisasi, lembaga, maupun instansi pemerintahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup pengeluaran uang yang dilakukan oleh instansi, penyampaian serta penerimaan, dan laporan keuangan merupakan sasaran dari pertanggungjawaban dalam keakuntabilitan (BPKB dan LAN, 2000) . Masyarakat akan menilai kinerja pemerintah yang memiliki kriteria keefisienan, ekonomis, serta efektif dengan cara melihat laporan program-

program pemerintah yang sudah dilaporkan, maka pemerintah harus melaporkan semua program-program yang sudah dijalankannya agar masyarakat dapat menilai kinerjanya. Masyarakat akan melihat perspektif akuntansi, perspektif sistem akuntabilitas serta perspektif fungsional untuk melihat keakuntabilan sebuah laporan keuangan (Beton, 2000).

Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari pemakaian anggaran, perencanaan anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh agar akuntabilitas laporan keuangan tersebut baik. Selain penyajian laporan keuangan, laporan yang secara langsung tersedia dan mudah diakses oleh pihak yang menggunakan laporan tersebut dan didalamnya mengandung informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan relevan juga berpengaruh pada Akuntabilitas laporan keuangan tersebut (Mahlil dkk, 2017). Permasalahan keuangan pemerintahan yang menjadi fokus utama masyarakat dapat diminimalisir oleh keakuntabilan sebuah laporan keuangan tetapi media seperti internet, surat kabar, media sosial, maupun cara yang lainnya belum menjadi hal yang umum bagi pemerintah untuk mempublikasi laporan keuangan mereka. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik mengharuskan pihak luar diberikan sebuah gambaran kinerja keuangan pemerintahan maupun organisasi oleh lembaga-lembaga publik tersebut (Mardiasmo, 2002).

Komitmen merupakan sebuah perjanjian dalam melakukan kontrak dan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu.

Komitmen berupa sikap dan perbuatan. Definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi (Allen & Meyer, 1993).

Komitmen kepala daerah merupakan sebuah hal untuk menstimulus jajaran dibawahnya untuk melakukan sebuah upaya-upaya progresif untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan secara jujur, relevan dan terbuka kepada publik, karena kegiatan dari pemerintah itu sendiri adalah sebuah amanah dari rakyat maka dari itu Komitmen dari seorang Kepala Daerah ini sangat penting demi menciptakan keakuntabilisan dari keuangan pemerintah daerah tersebut (Mahlil dkk, 2017).

Selain Komitmen Kepala daerah juga terdapat penerapan *Good Governance*, *Good Governance* merupakan sebuah konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik (Mardiasmo, 2002) . Sedangkan dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan bahwa *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggung jawab dan solid, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Jika pemerintahan melakukan tanggungjawabnya dengan baik serta

amanah (*good governance*) maka aspirasi masyarakat dan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara dapat terpenuhi (LAN, 2013).

Good governance merupakan hal yang mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti akuntabilitas, keadilan, transparansi (keterbukaan), kemandirian, dan partisipasi serta sumber daya pemerintah yang berbeda, dimana pemerintah harus menghendaki hal tersebut. dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, sehingga pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan yang sebaik-baiknya demi kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negara (Darmanto F.K, 2017).

Audit pada organisasi sektor publik juga mencakup audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No. 15 Tahun 2004, efisien, efektifitas, dan aspek ekonomi adalah hal hal yang harus ada pada pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, hal tersebut dapat disebut sebagai audit kinerja. Alasan pentingnya dilakukan audit kinerja adalah sebagai sebuah alat untuk evaluasi dan pengarah dalam pengalokasian sumber dana masyarakat agar terwujudnya suatu pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.

Jika suatu organisasi maupun perusahaan dapat mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan standar yang tinggi dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan rendah, maka kinerja suatu organisasi maupun perusahaan tersebut dapat dinilai baik. Maka dari itu

adanya audit kinerja pada organisasi pemerintah sangat dibutuhkan karena selain dapat menilai akuntabilitas laporan keuangan, juga dapat menilai kinerja pegawai.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan publiknya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kinerja keuangan dari pemerintah, hal tersebut dikemukakan dalam standar dalam SAP No.1 Tahun 2010.

Penyajian laporan keuangan pemerintah yang terpenting adalah sebuah pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakat karena sumber dana pemerintah itu sendiri berasal dari masyarakat. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat oleh pemerintah, dimana standar ini memuat persyaratan minimum isi laporan keuangan dan pedoman struktur laporan keuangan (Rinaldi, 2016).

Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak dapat dibandingkan, andal, dan relevan serta harus dapat dipahami baik oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan salah satu

organisasi yang menggunakan sumber dana publik, maka dari itu organisasi sektor publik harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan dengan terbuka dan setransparan mungkin (Putu *et al.*, 2014).

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada pemberitaan publik laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang kurang sesuai. Pada artikel yang diterbitkan oleh *m.detik.com* mengatakan bahwa BPK sudah banyak menemukan sebuah penyimpangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah khususnya di Jawa Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang mengatakan setiap tahun BPK mengeluarkan opini dan tahun 2018 ada empat daerah di Jateng yang belum WTP yaitu Klaten, Tegal, Rembang, dan Brebes. Dan tahun 2019 Brebes masih menyandang Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Purbaya, 2019).

Salah satu contoh yang menyebabkan Kabupaten Tegal belum mendapat opini WTP adalah perihal penghitungan dan pengelolaan aset tetap milik pemda yang dinilai masih belum sesuai dengan aset yang dimiliki, APBD yang disalahgunakan dan penyalahgunaan wewenang yang mungkin bisa terjadi. Dari data yang diperoleh di (*setda.tegalkab.go.id*) temuan keberadaan aset oleh BPK tersebut Rp. 49 M berhasil di tindak lanjuti, sementara Rp. 6 M masih dikejar

penuntasannya. Dengan adanya hal tersebut Kabupaten Tegal harus didorong pada nilai-nilai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta membangun sistem integrasi yang baik dengan pendampingan dari Inspektorat.

Penelitian mengenai Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti tedahulu, salah satunya dilakukan oleh (Rinaldi R.R, 2016), yang mengatakan bahwa *Good Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian selanjutnya oleh Darmanto, F.K (2017), juga mengatakan bahwa *Good Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Zeyn Elvira, (2011) memperoleh hasil bahwa penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan Friyani Rita, (2017) hasilnya *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian yang sudah ada, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian dari Zeyn Elvira, (2011) dan Darmanto, F.K (2017), Ada perbedaan dalam

penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel audit kinerja dari penelitian Darmanto, F.K (2017). Perbedaan juga terletak pada obyek penelitian dari Zeyn Elvira, (2011) yang mengambil obyek penelitian pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bandung, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Darmanto, F.K (2017) mengambil obyek penelitian pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan penelitian lebih jauh maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah”**. Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Tegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, adapun perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah di Kabupaten Tegal?
2. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah di Kabupaten Tegal?
3. Apakah audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah di Kabupaten Tegal?

4. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diangkat dan dibahas dalam penelitian ini maka dapat diketahui tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi lebih banyak wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas laporan keuangan pemerintahan, menjadi sebuah acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.
- c. Bagi akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi mengenai akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini, dan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Pancasakti Tegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal penyusunan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya yang berasal dari masyarakat. Manfaat lainnya adalah pemerintah dapat mengetahui betapa penting akuntabilitas dalam laporan keuangan, dimana dalam penelitian ini akan dapat diketahui alasan pentingnya akuntabilitas laporan keuangan.
- b. Bagi Masyarakat, Apabila pemerintah menyadari pentingnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan maka masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah akan dapat mengawasi secara langsung terhadap penggunaan dana yang berasal dari

mereka serta mengawasi kinerja dari pemerintah, mempermudah masyarakat mengakses laporan pertanggungjawaban dari pemerintah yang berbentuk laporan keuangan. Terwujudnya transparansi dalam pemerintahan akan membantu masyarakat ikut berperan aktif dalam pemerintahan sebagai pihak pengendali dan pengawas. Adanya peran dari masyarakat tersebut maka akan dapat mewujudkan pemerintahan akuntabel yang dapat dipercaya mengemban amanah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Akuntabilitas Keuangan

1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban dalam penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan serta menjawab segala hal yang menyangkut langkah seluruh keputusan dan proses yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya merupakan kualitas produk dan pelayan publik yang memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Bangsa yang berdemokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, maka masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat serta partisipasinya dalam pengambilan sebuah keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidupnya. Maka dari itu publik membutuhkan sebuah informasi dan kemajuan yang telah dicapai dan dikerjakan oleh pemerintah serta berbagai permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik (Lukito, 2014:4).

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 58 Ayat (1) dinyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan kuantitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan

menyelenggarakan sistem pengendalian internal dilingkungan pemerintah secara menyeluruh. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok, atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggungjawab.

Proses mendukung pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan dengan peraturan pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2013) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: (Rasul Syahrudin, (2002:11)

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan

penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

- b. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
- d. Akuntabilitas kebijakan Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
- e. Akuntabilitas finansial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian tentang akuntabilitas adalah mekanisme perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas

Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta - Agustus 2003 menyatakan Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan (Laolo, 2003).

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana dilapangan. Dibiidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum,

akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun mono loyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *rule of law*. Sedangkan *public accountability* didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nir massa, maupun media komunikasi personal.

- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program.
- c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2. Komitmen Kepala Daerah

Komitmen merupakan sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu atau kontrak dalam melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu. Komitmen berupa sikap dan perbuatan. Komitmen kepala daerah merupakan sebuah hal untuk menstimulus jajaran dibawahnya untuk melakukan sebuah upaya-upaya progresif untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus mampu menyediakann semua informasi keuangan secara jujur, relavan dan terbuka kepada publik, karena kegiatan dari pemerintah itu sendiri adalah sebuah amanah dari rakyat maka dari itu Komitmen dari seorang Kepala Daerah sangat penting demi menciptakan keakuntabilitan dari keuangan daerah tersebut. Pemimpin yang efektif pasti dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tidak hanya menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya saja tetapi juga ditunjukkan dengan sebuah perhatian seorang pemimpin terhadap karyawannya dan meningkatnya kualitas dari karyawan itu sendiri (Mahlil dkk, 2017).

Berdasarkan Pasal 184 UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah harus meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, Catatan atas Laporan keuangan. Selain itu, untuk tujuan akuntabilitas seharusnya pemerintah daerah juga melaksanakan penyediaan informasi keuangan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang dan memungkinkan untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah daerah dan penggunaan dana kepada publik.

Menurut Allen & Meyer (1993), suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. (Buchhanan, 1974) memandang komitmen sebagai partisan, keterikatan afektif dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, peran seseorang dalam kaitannya dengan tujuan dan nilai-nilai, dan untuk organisasi demi kepentingannya sendiri, terlepas dari instrumen nilainya.

Dari definisi-definisi yang sudah dibuat oleh para ahli, sebuah komitmen dapat disimpulkan sebagai sebuah kekuatan psikologis individu untuk mengidentifikasikan dirinya dengan organisasinya, menerima visi misi dan tujuan organisasi serta selalu menginginkan

dirinya bertahan untuk menjadi bagian dari organisasi. Maka dari itu seorang Kepala Daerah harus memiliki sebuah komitmen yang baik karena dengan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap sebuah akuntabilitas keuangan dari pemerintahan itu sendiri, selain itu dengan adanya Kepala Daerah yang memiliki komitmen yang baik seluruh kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh anggota dan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

Karakteristik Komitmen Menurut Michaels (Michaels, 1997), ciri-ciri komitmen organisasi dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ciri-ciri komitmen pada pekerjaan diantaranya menyenangkan pekerjaannya, mampu berkonsentrasi pada pekerjaannya, tetap memikirkan pekerjaan walaupun tidak bekerja.
- 2) Ciri-ciri komitmen dalam kelompok seperti selalu siap menolong teman kerjanya, selalu berupaya untuk berinteraksi dengan teman kerjanya, memperlakukan teman kerjanya sebagai keluarga, selalu terbuka pada kehadiran teman kerja baru.
- 3) Ciri-ciri komitmen pada organisasi antara lain : selalu berupaya untuk mensukseskan organisasi, selalu mencari informasi tentang kondisi organisasi, selalu berupaya untuk memaksimalkan kontribusi kerjanya sebagai bagian dari usaha organisasi keseluruhan.

Faktor yang mempengaruhi sebuah komitmen, Komitmen baik seorang pegawai maupun seorang kepala pada organisasi tidak terjadi

begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. (Steers, 1988) menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi komitmen seorang pegawai antara lain :

- 1) Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap pegawai.
- 2) Ciri pekerjaan, seperti *job description* identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan sekerja.
- 3) Pengalaman kerja, seperti *track record* pekerjaan sebelumnya dan cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya tentang organisasi.

Menurut Allen & Meyer (1993), komitmen dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Komitmen Afektif : merupakan tingkat rasa percaya pegawai secara emosional terhadap pemimpin dan organisasinya serta tingkat kesediaan pegawai untuk mengabdikan hidupnya kepada organisasi dan menaati pemimpinnya.
- b. Komitmen Berkelanjutan : merupakan tingkat kecintaan pegawai terhadap pemimpin dan organisasi secara rasional bermanfaat baik secara psikologis dan logis, keinginan pegawai dalam bertahan pada organisasi dan pekerjaannya, serta tingkat perasaan terganggu dalam hidup bila meninggalkan pekerjaannya.

- c. **Komitmen Normatif** : merupakan tingkat kesetiaan terhadap pimpinan dan organisasinya, rasa bahagia dalam organisasinya dan kesetiaan terhadap organisasi karena telah banyak memberikan jasa.

Komitmen pimpinan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain keterlibatan pimpinan, adanya kebijakan atau peraturan secara tertulis, serta kebijakan yang disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Bentuk nyata dari keterlibatan kepemimpinan adalah dengan cara mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjamin keberlangsungan sebuah organisasi itu sendiri, adanya sebuah kebijakan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan serta dikomunikasikan kepada setiap pegawai, dan melaksanakan pelatihan. Dengan demikian pimpinan akan memberikan sebuah dorongan motivasi kepada karyawannya agar dapat melaksanakan program dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

3. *Good Governance*

Perkembangan teknologi adalah sebuah acuan dasar dalam mewujudkan suatu pengelolaan daerah, sehingga pemerintah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *Good Governance*. *Good Governance* merupakan sebuah upaya pemerintah yang amanah, untuk menciptakan sebuah *Good Governance* pemerintah perlu melakukan sebuah sentralisasi yang

sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Rahmatika, (2014)

Untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan demi memenuhi seluruh aspirasi dari masyarakat dan demi mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan diterapkannya UU No. 28 Tahun 1999 dan Tap.MPR RI No. XI/MPR/1998 yang didalamnya menjelaskan tentang penyelenggara negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak tahun 2003 telah dikeluarkan paket undang-undang (UU) pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari suatu perubahan mendasar dibidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Definisi *Good Governance* menurut *Word Bank* ialah sebagai suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik yang dilakukan secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan *legal and political framework* guna tumbuhnya usaha. (Mardiasmo, 2002)

Menurut BPK dalam Rahmatika, (2014) pemerintahan yang baik mengandung dua arti, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan sosial.
- b. Aspek fungsional pemerintah yang efisien dan efektif dalam setiap pelaksanaan tugasnya agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan sebuah iklim partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dalam sektor publik (Rahmantika, 2014). Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah sebagai berikut:

- 1) *Participation* (Partisipasi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang bisa melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dapat dibangun atas dasar kebebasan berbicara dan bersosialisasi serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law* (Penetapan Hukum), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. (tidak *diskriminatif*).
- 3) *Transparency* (Transparasi), transparasi dibangun atas sebuah dasar kebebasan memperoleh informasi dari pemerintah informasi

yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkannya.

- 4) *Responsiveness* (Responsif) sesuai dengan prinsip dasarnya yaitu lembaga-lembaga publik atau entitas harus mempunyai daya tangkap yang cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat (*stakeholder*).
- 5) *Consensus orientation* (berorientasi), berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- 6) *Equity* (kesetaraan), setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sebuah kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan dari pemerintah.
- 7) *Efficiency and Effectiveness*, merupakan sebuah pengelolaan sumberdaya publik yang harus dilakukan secara berguna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*).
- 8) *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.
- 9) *Strategic vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh kedepannya.

Dari sembilan karakteristik diatas, paling tidak ada beberapa hal yang harus bisa diperankan oleh akuntansi sektor publik yang menciptakan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency and effectiveness*) (Mardiasmo, 2009).

Kemudian menurut Mardiasmo (2017) Prinsip utama yang menjadi dasar dari penerapan Good Government Governance adalah :

- a.) Transparansi (*Transparency*) , Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
- b.) Akuntabilitas (*Accountability*), Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- c.) Responsibilitas (*Responsibility*), Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.
- d.) Independensi (*Independency*), Demi kelancaran pelaksanaan *Good Government Governance*, instansi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e.) Kesenjangan dan Kewajaran (*Fairness*), Kesenjangan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan

kegiatannya, instansi harus senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

4. Audit Kinerja

Audit merupakan sebuah pengujian sistematis, teorganisasi, dan objektif atas suatu entitas guna menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan sebuah pelayanan publik secara efisien serta efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan sebuah rekomendasi untuk peningkatan kinerja (Ulum, 2009).

Pasal 4 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Audit kinerja adalah audit atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa audit kinerja mencakup tujuan yang luas serta bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaian hasil dan efektifitas program, ekonomi dan efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkan efektifitas. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (prestasi kerja) auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan.

Jenis-Jenis Audit Kinerja Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi memberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya. Menurut (Mardiasmo, 2004) audit kinerja meliputi dua jenis, yaitu:

- 1) Audit Ekonomi dan Efisiensi Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan:

- a. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.
- b. Penyebab timbulnya inefisiensi atau pemborosan yang terjadi, termasuk ketidakcukupan sistem informasi manajemen, prosedur administratif, atau struktur organisasi.
- c. Apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan praktek ekonomi dan efisien. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

Audit Efektivitas Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah, dan apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program.

Standar Audit Kinerja Sektor Publik Dalam melaksanakan suatu audit, diperlukan standar yang akan digunakan untuk menilai mutu

pekerjaan audit yang dilakukan. Standar tersebut memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia standar audit pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN adalah sebagai berikut:

- 1.) Standar Umum
- 2.) Standar Pelaksanaan Audit Kinerja
- 3.) Standar Pelaporan Audit Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor menurut Elizabeth hanna (2013) adalah sebagai berikut :

1. Struktur Audit : merupakan pendekatan sistematis terhadap auditing yang dijelaskan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedurrangkaian logis, keputusan dan menggunakan sekumpulan alat serta kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor dalam melakukan audit.
2. Ketidakjelasan Peran : seseorang dapat mengalami ketidakjelasan peran apabila mereka merasa tidak ada ketidakjelasan sehubungan dengan ekspektasi pekerjaan, seperti kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tidak memperoleh kejelasan mengenai deskripsi tugas dari pekerjaan mereka (Ramadhan, 2011).

3. Gaya Kepemimpinan : merupakan cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi mungkin hal tersebut tidak disenang. Pemimpin adalah pemain utama yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi (Trisnaningsih, 2007).
4. Budaya Organisasi : merupakan pola pemikiran, perasaan, dan tindakan dari sekelompok sosial yang membedakannya dengan sekelompok sosial yang lain (Yunskar, 2011). Budaya organisasi adalah gabungan atau integrasi dari falsafah, ideologi, nilai-nilai, kepercayaan, harapan-harapan, norma, dan sikap (Trisnaningsih, 2007).
5. Independensi Auditor : merupakan sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur kepada semua pihak (Kasidi, 2007)

5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak jauh dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktifitas pemberi jasa (*service activity*) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pemakai (*user*) dalam rangka pengambilan suatu keputusan. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 476/KM/K.01/01,

Akuntansi merupakan sebuah proses pengumpulan, penganalisaan, pengklarifikasian, pencatatan, peringkasan dan pelaporan terhadap suatu transaksi keuangan satuan ekonomi untuk menyediakan sebuah informasi keuangan bagi yang memerlukan informasi tersebut yang berguna dalam pengambilan sebuah keputusan.

Menurut Halim (Halim, 2012) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi berupa angka atau kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang logis dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Dari berbagai definisi para ahli mengenai akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang akuntansi yang didalamnya berkaitan dengan berbagai lembaga pemerintahan maupun kegiatan jasa yang berguna untuk menyediakan sebuah informasi berupa angka atau kuantitatif yang bersifat keuangan pemerintah dimana untuk pengambilan sebuah keputusan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berdasarkan pada proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan telah diamanatkan dalam berbagai peraturan penrundang-undangan seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun

2005 juga tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 (3) Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) yang dipakai dalam pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan pokok, diantaranya: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dalam PSAP Nomor 1,2,3,4 (Bastian, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan ini adalah suatu persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah (Elsye, dkk. 2016 : 65). Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karakteristiknya sebagai berikut:

- a. PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan, Tujuan dari standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan sesuai dengan tujuan umum dalam upaya untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Indikator pengukuran penyajian laporan keuangan sebagai berikut :
 - 1) Komponen Laporan Keuangan
 - 2) Identifikasi Laporan Keuangan
 - 3) Periode Pelaporan
- b. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai setiap kegiatan pemerintah pusat maupun daerah dalam periode yang akan datang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara komperatif. Indikator pengukuran laporan realisasi anggaran dapat dilihat dari isi laporan realisasi anggaran yang sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus atau Defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan neto dan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran. (SiLPA/SiKPA)
- c. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas, Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta

berguna untuk menilai kecermatan atau taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Penyajian laporan arus kas terdiri dari:

- 1) Aktivasi Operasi
 - 2) Aktivasi Investasi Aset Non Keuangan
 - 3) Aktivasi Pembiayaan
 - 4) Aktivasi Non Anggaran
- d. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karakteristik tersebut menjadi persyaratan normatif yang harus diterapkan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dan agar mencapai sebuah keakuntabilisan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik tersebut terdiri dari :

1. Relevan, informasi dapat dinyatakan relevan jika informasi yang disajikan tersebut bisa mempengaruhi keputusan bagi para pengguna dengan membantu mereka agar dapat mengevaluasi peristiwa dimasalalu atau masa sekarang dan dapat digunakan untuk memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat digunakan dengan maksud penggunaanya. Informasi yang relevan memiliki unsur sebagai berikut:
 - a.) Manfaat umpan balik (*feedback value*)

- b.) Manfaat prediktif (*redictive value*)
 - c.) Tepat waktu (*timelines*)
 - d.) Lengkap
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diferifikasi, informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Suatu informasi dapat dikatakan andal apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a.) Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)
 - b.) Dapat diferifikasi (*verivability*)
 - c.) Netralitas
3. Dapat Dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pengguna maupun pihak-pihak tertentu dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan dan pemahaman para pengguna laporan keuangan tersebut. Maka dari itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai dalam kegiatan serta lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksudkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tentang Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah sering dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mendapat hasil yang berbeda-beda. Dibawah ini akan diringkas hasil penelitian tentang Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

1. Rinaldi R.R, (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian primer kuantitatif. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta.

2. Mahlil dkk, (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis data (1) uji kualitas data meliputi ujivaliditas dan uji reabilitas instrumen; dan (2) analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokrdastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Komitmen Kepala Daerah dan Pengetahuan Akuntansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Provinsi Aceh, Variabel Komitmen Kepala Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Provinsi Aceh, dan variabel Pengetahuan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Provinsi Aceh.
3. Darmanto, F.K (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karang Anyar. Penelitian ini menggunakan analisis data (1) uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reabilitas instrumen; dan

(2) analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokrdastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Governance*, Audit Kinerja , dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Karang Anyar.

4. Friyani Rita, (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis data (1) uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reabilitas instrumen; dan (2) analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokrdastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal, *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Derah Kota Jambi, Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Jambi, *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Jambi dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Jambi.
5. Zeyn Elvira, (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode survey

yang terdiri dari *descriptive survey* dan *explanatory survey* dengan *investigation type* yang bersifat kausalitas. Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara artinya penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizal Ricky Rinaldi, (2016)	Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: 1. Good Governance (X1) 2. Audit Kinerja (X2) 3. Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan	-Good Governance berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Surakarta. -Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. -Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Pemerintah Daerah	
2.	Mahlil, M. Rizal Yahya (2017)	Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh	Variabel Independen: 1. Komitmen Kepala Daerah (X1) 2. Pengetahuan Akuntansi (X2) Variabel Dependen: Kualitas Lapoan Kuangan Pemerintah	-Variabel Komitmen Kepala Daerah dan Pengetahuan Akuntansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Provinsi Aceh. -Variabel Komitmen Kepala Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Provinsi Aceh. -Variabel Pengetahuan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Provinsi Aceh.
3.	Fauzia Kartika Darmanto, (2017)	Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karang Anyar	Variabel Independen 1. GOOD GOVERNANCE (X1) 2. Audit Kinerja (X2) 3. Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Karanganyar	-Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta. -Audit Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. -Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.
4.	Rita Friyani (2017)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan	Variabel Independen: 1. Desentralisasi Fiskal (X1) 2. Good Governance	-Desentralisasi Fiskal, Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Derah Kota Jambi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi	(X2) 3. Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Jambi	-Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Jambi. -Good Governance tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Jambi. -Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Jambi.
5.	Elvira Zeyn (2011)	Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan	Variabel Independen: - <i>Good Governance</i> (X1) -Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan (Y)	Penerapan <i>good governance</i> dan standar akuntansi pemerintahan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara artinya penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik adalah kerangka yang

membahas secara teoritis pertautan antar variabel-variabel. Dengan demikian secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. (Sugiyono, 2016)

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana tentang hubungan antar variabel. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah.

1. Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Akuntabilitas

Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen kepala daerah merupakan sebuah hal untuk menstimulus jajaran dibawahnya untuk melakukan sebuah upaya-upaya progresif untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah komitmen dapat disimpulkan sebagai sebuah kekuatan psikologis individu untuk mengidentifikasikan dirinya dengan organisasinya, menerima visi misi dan tujuan organisasi serta selalu menginginkan dirinya bertahan untuk menjadi bagian dari organisasi. (Yahya, 2017)

Komitmen kepala daerah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah karena LKPD yang belum mendapatkan opini WTP perlu perbaikan, untuk itu diperlukan sebuah komitmen yang kuat dari kepala daerah serta seluruh jajarannya. Terkait opini LKPD,

Opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan dan tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Daerah selaku pemimpin dari organisasi pemerintahan di daerah merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh dalam upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas dari Keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu seorang Kepala Daerah harus memiliki sebuah komitmen yang baik, dengan adanya Kepala Daerah yang berkomitmen seluruh kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh anggota dan masyarakat tentu dapat terealisasi dengan baik. (Mahlil dkk, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yahya, 2017) , yang membahas tentang Komitmen Kepala Daerah dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa Komitmen Kepala Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Semakin baik komitmen dari seorang Kepala daerah maka akan semakin baik tingkat keakuntabilan keuangan pemerintahan karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dalam layanan publik yang tidak diskriminasi dan memiliki kepastian waktu serta biaya.

2. Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah

Good Governance merupakan kegiatan penyelenggaraan manajemen pemerintah yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran kesalahan alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, dalam menjalankan suatu disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009).

Pengaruh penerapan *good governance* dengan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah tentu memiliki pengaruh, hal tersebut karena laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah akan akuntabel jika memenuhi semua prinsip *good governance*, dengan pemenuhan dasar-dasar pelaporan keuangan yang merupakan prinsip *good governance* maka pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah dengan sendirinya akan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan dari masyarakat. Terpenuhinya dasar-dasar pelaporan keuangan tersebut juga dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan daerah karena sumberdaya daerah akan dikelola untuk tujuan pelayanan masyarakat. Jadi, pemerintah yang telah menerapkan *good governance* maka akuntabilitas keuangannya akan lebih baik Suratmi, (2014).

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zeyn Elvira, (2011) dan Azlim dkk (2012) yang membahas mengenai *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan

dapat memperoleh kesimpulan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, kemudian standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Semakin tinggi organisasi atau perusahaan menerapkan *good governance* maka semakin tinggi juga tingkat keakuntabilan keuangannya, hal ini karena dengan menerapkan *good governance* maka seluruh personel atau anggota perusahaan akan mengedepankan etika dan memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga perusahaan atau organisasi mampu mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah digariskan.

3. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilan Keuangan Pemerintah Daerah

Audit adalah sebuah pengujian sistematis, teorganisasi, dan objektif atas suatu entitas guna menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan sebuah pelayanan publik secara efisien serta efektif dalam memenuhi harapan *stakeholder* dan memberikan sebuah rekomendasi untuk peningkatan kinerja (Ulum, 2009).

Pengaruh antara Audit Kinerja dengan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah jelas memiliki keterpengaruhan, hal tersebut dapat diperkuat dengan UU Pasal 4 ayat 3 No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Audit kinerja adalah audit atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektifitas. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN) menyatakan bahwa audit kinerja mencakup tujuan yang luas serta bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk meningkatkan akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah. Pada praktiknya, semua langkah yang ditempuh dari mulai tahap perencanaan harus dilakukan oleh auditor selama melakukan pemeriksaan agar menghasilkan temuan dan rekomendasi yang tepat sehingga dapat mencapai Akuntabilitas Keuangan publik yang akan meningkat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmanto F.K, (2017) dan Rinaldi R.R, (2016) yang didalamnya membahas Audit Kinerja terhadap sebuah Peningkatan Kinerja Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa hasil audit kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan dan akuntabilitas keuangan. Semakin baik kinerja dari seorang auditor didalam perusahaan maupun organisasi maka semakin tinggi nilai budaya dan profesionalisme auditor sehingga lebih tinggi kemungkinan untuk mencapai keuangan yang akuntabel.

4. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

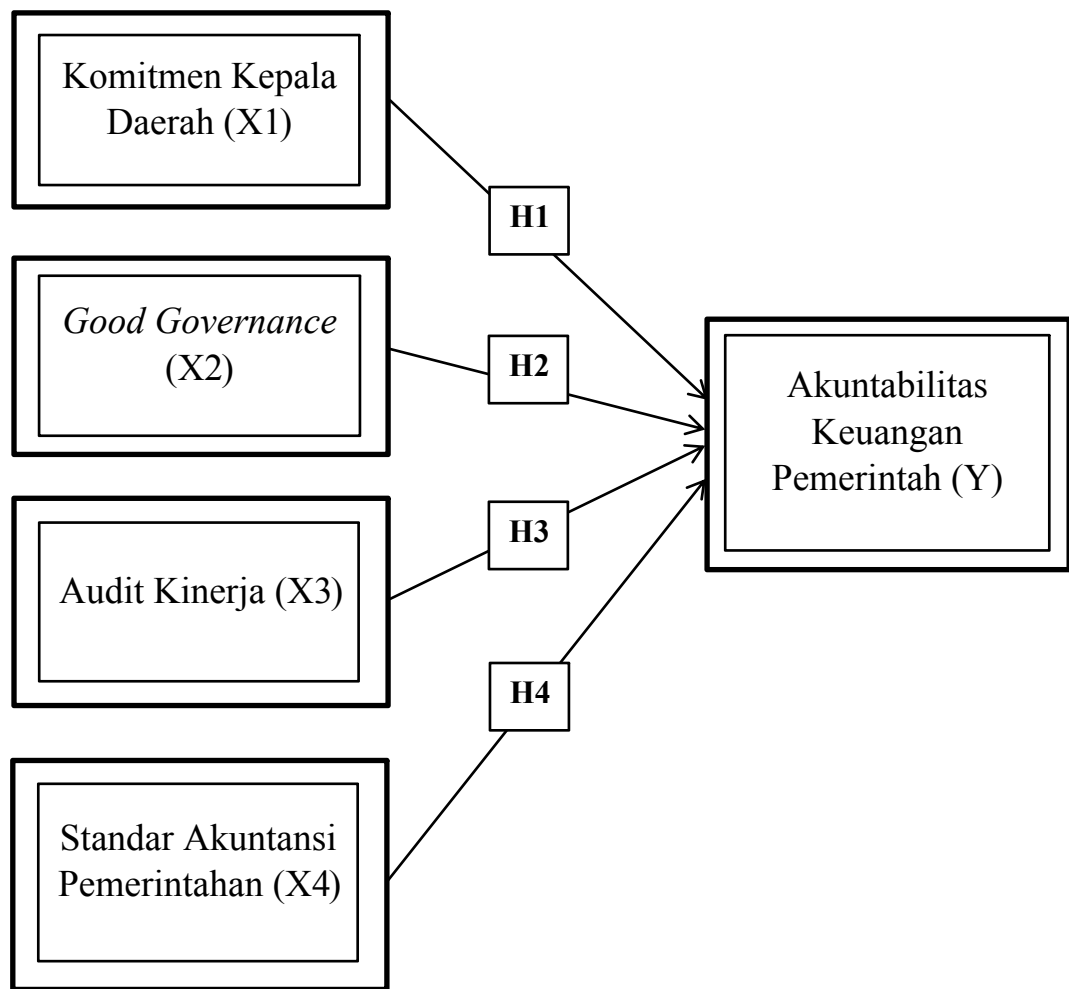
Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan dari kedua peraturan tersebut yaitu terletak pada basis pencatatan-pencatatan transaksi dan laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah, hal tersebut dapat diperkuat dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang wajib dilakukan dalam penyusunan dan penyajian suatu laporan keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut Standar Akuntansi Pemerintahan Merupakan persyaratan dan ketentuan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas dari Keuangan pemerintah di Indonesia.

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rinaldi R.R, (2016), Friyani Rita, (2017), dan Darmanto F.K, (2017) yang membahas tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan memperoleh kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. Semakin tinggi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan semakin tinggi pula tingkat keakuntabilisan keuangan dalam pemerintahan tersebut, hal ini karena Standar Akuntansi Pemerintahan sangat teerkait dengan kualitas laporan

keuangan karena dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang akan penulis uji adalah sebagai berikut :

- H1 :** Komitmen Kepala Daerah Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.
- H2 :** Penerapan Good Governance Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.
- H3 :** Audit Kinerja Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.
- H4 :** Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan mengolah data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden kemudian menganalisis dengan program SPSS sehingga memperoleh data dan hasil yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang ada. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menjadikan filsafat positivisme sebagai landasan, hanya meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pada umumnya teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, analisis data berupa kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2017).

B. Objek Penelitian

1. Populasi

Populasi yaitu wilayah abstraksi yang mencakup subyek maupun obyek yang berkualitas dan memiliki kriteria atau karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti sebagai bahan untuk dipelajari sehingga dapat menarik kesimpulan (Sugiyono, 2017) . Populasi didalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten

Tegal yang beralamat di Jl. Raya Selatan Banjarn No.87, Kedungcokol, Procot, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52411.

2. Sampel

Sampel (*sample*) adalah bagian dan karakteristik yang ada pada populasi (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi yang relatif kecil. Jumlah sampel pada penelitian ini 37 orang yang terdiri dari 31 jabatan fungsional Auditor dan 6 Jabatan Fungsional P2UPD. Dalam teknik ini semua anggota populasi dijadikan sampel karena jumlah populasi sedikit untuk mengantisipasi tingkat pengembalian kuesioner yang rendah.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:30) adalah sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar memperoleh informasi yang diinginkan dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Berikut penjelasan tentang kedua variabel tersebut:

a. Variabel Bebas/Independen (X)

- 1) Komitmen Kepala Daerah (X1)

Komitmen kepala daerah merupakan sebuah hal untuk menstimulus jajaran dibawahnya untuk melakukan sebuah upaya-upaya progresif untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan secara jujur, relevan dan terbuka kepada publik, karena kegiatan dari pemerintah itu sendiri adalah sebuah amanah dari rakyat maka dari itu Komitmen dari seorang Kepala Daerah ini sangat penting demi menciptakan keakuntabilisan dari keuangan pemerintah daerah tersebut (Mahlil dkk, 2017).

Dalam penelitian ini Komitmen Kepala Daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Mayer Allen, (1993) dan disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan 3 indikator, yaitu : (1) Komitmen Afektif, (2)Komitmen Berkelanjutan, (3) Komitmen Normatif, Dimana semua pernyataan diukur menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapatkan dibuat skor, yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

2) Penerapan *Good Governance* (X2)

Good Governance menurut *Word Bank* adalah suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik yang dilakukan secara politik maupun

administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan *legal and political framework* guna tumbuhnya usaha. (Mardiasmo, 2002)

Dalam penelitian ini penerapan *Good Governance* diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Zeyn Elvira, (2011) dan disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan 5 indikator, yaitu : (1) Akuntabilitas, (2) Transparasi, (3) Penetapan Hukum, (4) Responsivitas (5)Efisien dan efektif. Dimana semua pernyataan diukur menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapatkan dibuat skor, yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3) Audit Kinerja (X3)

Audit Kinerja merupakan pengujian sistematis, teorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kerja (Ulum, 2009).

Dalam penelitian ini Audit Kinerja diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Elizabeth (2013), dan disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan 5 indikator, yaitu : (1) Struktur Audit, (2)Ketidak jelasan Peran, (3)Gaya Kepemimpinan, (4) Budaya Organisasi, (5) Independensi

Auditor. Dimana semua pernyataan diukur menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapatkan dibuat skor, yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

4) Standar Akuntansi Pemerintahan (X4)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. PP Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Azlim dkk. 2012).

Dalam penelitian ini Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Zeyn Elvira, (2011) dan disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan 5 indikator, yaitu : (1) Akuntabilitas, (2) Transparasi, (3) Penetapan Hukum, (4) Responsivitas (5)Efisien dan efektif. Dimana semua pernyataan diukur menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapatkan dibuat skor, yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

b. Variabel Terkait/Dependen (Y)

1.) Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan (Y)

Akuntabilitas Keuangan merupakan sebuah pengungkapan, integritas keuangan serta suatu ketaatan sebuah organisasi, lembaga, maupun instansi pemerintahan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup sebuah pengeluaran uang yang dilakukan oleh instansi, penyampaian serta penerimaan, dan sebuah laporan keuangan merupakan sebuah sasaran dari pertanggungjawaban dalam sebuah keakuntabilitan (BPKB dan LAN, 2000).

Dalam penelitian Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Rasul Syahrudin, (2002) dan disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan 5 indikator, yaitu : (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, (2) Akuntabilitas Manajerial, (3) Akuntabilitas Kebijakan, (4) Akuntabilitas Program, (5) Akuntabilitas Finansial. Dimana semua pernyataan diukur menggunakan skala ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapatkan dibuat skor, yaitu nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Y) (Rasul Syahrudin, 2002)	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	a) Kepatuhan terhadap hukum dan aturan lain yang berlaku. b) Penghindaran penyalahgunaan jabatan.	Ordinal	1-2
	2. Akuntabilitas Manajerial	a.) Pengelolaan organisasi-organisasi secara efektif dan efisien b.) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan organisasi.	Ordinal	3-4
	3. Akuntabilitas Kebijakan	a.) Pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.	Ordinal	5-6
		b.) Mempertanggungjawabkan kebijakan, mempertimbangkan dampak dimasa depan.		
	c.) Akuntabilitas Program	a.) Menentukan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. b.) Mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan efektifitas yang dicapai	Ordinal	7-8
	d.) Akuntabilitas Finansial	a.) Penggunaan uang secara ekonomis, efektif dan efisien dan tidak terjadi pemborosan dan kebocoran dana dan korupsi. b.) Membuat dan mempublikasikan laporan keuangan.	Ordinal	9-10
Komitmen Kepala Daerah (X1) Mayer Allen, (1993)	1. Komitmen Afektif	a.) Tingkat rasa percaya pegawai secara emosional terhadap pemimpin dan organisasinya. b.) Tingkat kesediaan pegawai untuk	Ordinal	1-2

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
		mengabdikan hidupnya kepada organisasi dan menaati pemimpinnya.		
	2. Komitmen Berkelanjutan	a.) Tingkat kecintaan pegawai terhadap pemimpin dan organisasi secara rasional bermanfaat baik secara psikologis dan logis. b.) Tingkat keinginan pegawai dalam bertahan pada organisasinya. c.) Tingkat keinginan bertahan dengan pekerjaannya. d.) Tingkat ketertarikan pegawai dalam pekerjaannya. e.) Tingkat perasaan terganggu dalam hidup bila meninggalkan pekerjaannya.	Ordinal	3-7
	3. Komitmen Normatif	a.) Tingkat kesetiaan terhadap pimpinan dan organisasinya. b.) Tingkat rasa bahagia dalam organisasinya. c.) Tingkat kesetiaan terhadap organisasi karena telah banyak memberikan jasa.	Ordinal	8-10
<i>Good Governance</i> (X2) (Mardiasmo, 2017)	1. Akuntabilitas	a.) Pemahaman individu terhadap tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. b.) Pemahaman terhadap penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi dan misi instansi.	Ordinal	1-2
	2. Transparansi	a.) Sistem komunikasi yang baik dengan masyarakat seperti dengan sebuah pelayanan yang baik. b.) Penyampaian penggunaan kas donas	Ordinal	3-4

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
		kepada masyarakat dengan terbuka dan transparan.		
	3. Penetapan Hukum	a.) Penerapan hukum pada pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. b.) Keadilan sanksi yang diberikan kepada pegawai dan pemimpin yang melanggar peraturan.	Ordinal	5-6
	4. Responsivitas	a.) Aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. b.) Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan.	Ordinal	7-8
	5. Efisien dan efektif	a.) Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya publik. b.) Penyelenggaraan kegiatan instansi dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.	Ordinal	9-10
Audit Kinerja (X3) Elizabeth hanna, (2013)	1. Struktur Audit	a.) Langkah-langkah penentuan audit, prosedur, rangkaian logis, keputusan dan dokumentasi. b.) Auditor melakukan audit secara komprehensif dan terintegritas.	Ordinal	1-2
	2. Ketidakefektifan Peran	a.) Kurangnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. b.) Tidak memperoleh kejelasan mengenai deskripsi tugas dari pekerjaan auditor.	Ordinal	3-4
	3. Gaya Kepemimpinan	a.) Pemimpin dapat memberikan pengaruh dalam menanamkan kedisiplinan.	Ordinal	5-6

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
		b.) Auditor disiplin bekerja untuk meningkatkan kinerjanya.		
	4. Budaya Organisasi	a.) Nilai-nilai dominan atau kebiasaan dalam suatu organisasi perusahaan. b.) Nilai budaya diacu sebagai filosofi kerja karyawan.	Ordinal	7-8
	5. Independensi Auditor	a.) Auditor memiliki sikap tidak memihak. b.) Auditor mengambil tindakan dan keputusan sendiri.	Ordinal	9-10
Standar Akuntansi Pemerintah PSAP kerangka Konseptual, (2005)	1. Relevan	a.) Memiliki manfaat umpan balik (<i>feedback value</i>) & manfaat prediktif (<i>predictive value</i>) b.) Tepat Waktu (<i>timelines</i>)	Ordinal	1-2
	2. Andal	a.) Penyajian wajar/ jujur (<i>representational faithfulness</i>) b.) Dapat Diverifikasi (<i>verifiability</i>) c.) Netralitas	Ordinal	3-5
	3. Dapat Dibandingkan	a.) Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya b.) Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain.	Ordinal	6-7
	4. Dapat dipahami	a.) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna b.) Informasi dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	Ordinal	8-9

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode kuesioner sebagai metode pokok dan metode wawancara sebagai metode bantu:

a.) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan cara lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.

b.) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan satu set yang berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada masing-masing responden untuk kemudian dijawab.

F. Uji Instrumen Penelitian

Kuesioner yang dibuat oleh peneliti akan diuji tingkat kevalidan dan reliabilitasnya dengan cara mengukur terhadap jawaban responden dengan rincian sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah kuesioner. Koefisien validitas menggambarkan tingkat kemampuan instrumen untuk mengungkapkan data atau informasi dari variabel yang diukur. Dengan kata lain, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila *Pearson Correlation* yang diperoleh memiliki nilai dibawah 0,025 maka data yang diperoleh valid. Menurut (Ghozali, 2016) Uji Signifikasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r *table* untuk *Degree Of Freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sample. Jadi jika r hitung $>$ r *table* maka pernyataan ataupun indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut (Ghozali, 2016) Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut (Ghozali, 2016) pengukuran reabilitas dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sebagai berikut:

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang dimana seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian dapat dilihat apakah seseorang tersebut tetap konsisten dengan jawabannya atau tidak.
2. *One Shot* atau pengukuran sekali, yaitu pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan kemudian hasil dari pengukuran tersebut dibandingkan dengan pertanyaan yang lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan andal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

G. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Setelah kuesioner yang telah dikirimkan kepada responden kembali, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan agar dapat menggambarkan hubungan dan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dimana kuesioner yang telah terkumpul kemudian diolah dalam bentuk tabulasi dengan memberikan bobot jawaban pada masing-masing

pertanyaan. Dari tabulasi data tersebut dihasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dihitung menggunakan perhitungan statistik. Pada penelitian ini digunakan alat bantu program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) versi 22.0.

1) Analisis Statistik Deskriptif

Dalam bukunya Sugiono (Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif ini menginformasikan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, *mean* dan standar defiasi data yang digunakan dalam penelitian. (Wijaya, 2009:41)

2) Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diolah merupakan data yang valid/sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi yang normal, maka data tersebut dapat diisi melalui uji asumsi klasik, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi variabel mengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2016) . Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik dengan uji

one sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan cara menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Uji ini dikatakan Normalitas apabila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonierita adalah situasi adanya korelasi variabel – variabel bebas diantara satu dengan yang lain. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Untuk mengujinya dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor (VIF), berikut kriteria VIF antara lain :

- 1.) Apabila nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 10$ maka variabel dapat dikatakan bebas dari gejala multikolonearitas.
- 2.) Apabila nilai $VIF > 10$ dan $tolerance < 0,1$ maka variabel terdapat gejala multikolonearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan

deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadinya Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastiditas bisa dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastiditas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastiditas Ghozali (2016:134).

3. Analisis Regresi Berganda

Pengolahan pada data penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22.0 untuk menghitung Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap suatu variabel dependen (Ghazali, 2009) . Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat

hubungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = kualitas laporan keuangan

a = konstanta

$b_1=b_4$ = Koefisien Regresi

X1 = Komitmen Kepala Daerah

X2 = *Good Governance*

X3 = Kinerja Audit

X4 = Standar Akuntansi Pemerintahan

e = eror

4. Uji Hipotesis

a) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Yaitu suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar Komitmen Kepala Daerah, *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara individual terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1.) Nilai signifikan $< 0,025$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2.) Nilai signifikan $>0,025$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

b) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Umumnya koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya suatu variasi yang besar diantara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016).

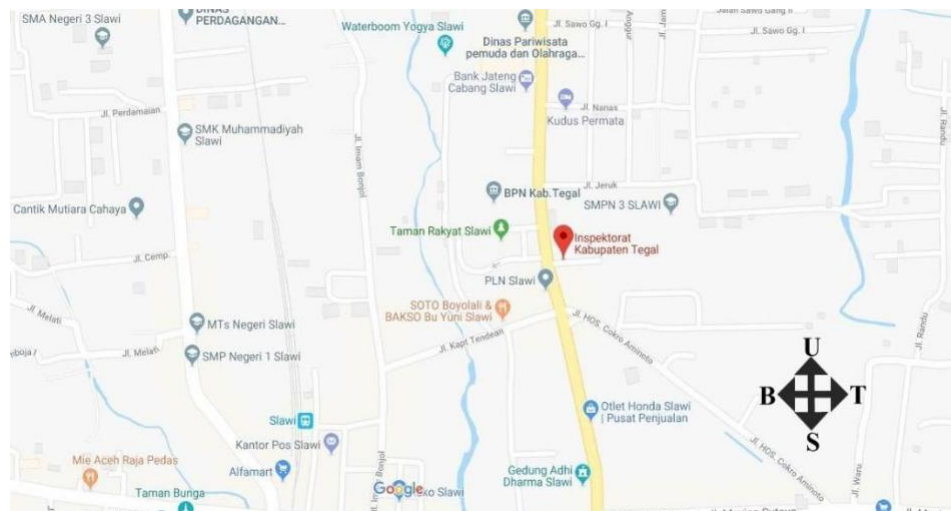
BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tegal

1. Lokasi Inspektorat Tegal

Inspektorat Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 173 Slawi. Peta lokasi Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: www.google.com/maps/place/Inspektorat+Kabupaten+Tegal/

Gambar 4.1

Peta Lokasi Inspektorat Kabupaten Tegal

2. Kedudukan Organisasi

Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.

a. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tegal

1) Visi

“Terwujudnya Pengawasan yang Profesional, Terencana, Obyektif dan Tepat Waktu menuju Penyelenggaraan Kepemerintahan Kabupaten Tegal yang Baik”.

2) Misi

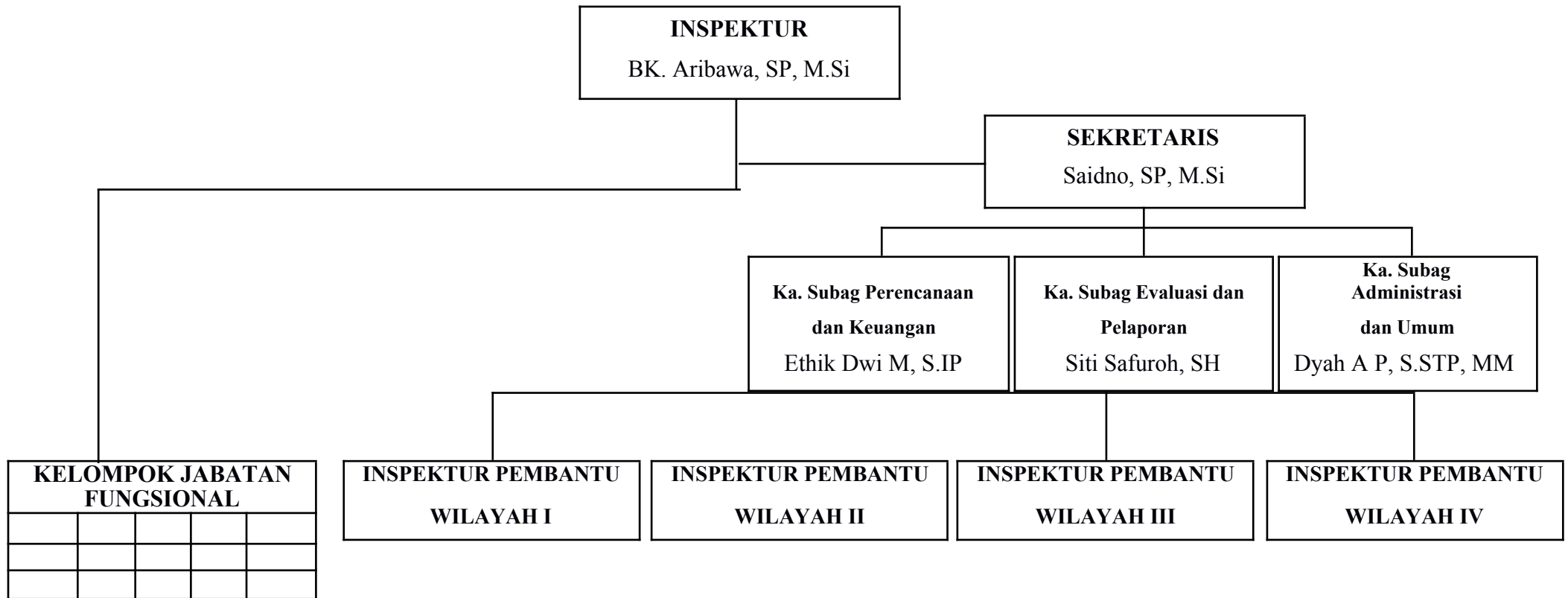
- a. Meningkatkan penguatan Sistem Kelembagaan Pengawasan.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Pengawasan.
- c. Mendorong peran serta aktif aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam rangka perwujudan *Good Governance*.
- d. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mengemban kewenangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi Inspektorat Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektur Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL**



**GAMBAR 4.2
BAGAN ORGANISASI**

Tabel 4.1

Tugas Pokok dan Fungsi

Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
Inspektur	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa Untuk melaksanakan tugas tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana kerja. 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan. 3. Penyelenggaraan fasilitas pengawasan. 4. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 5. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan / ketatausahaan Inspektorat. 6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat.
Sekretaris	Membantu Inspektur dalam melaksanakan Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan draf rencana kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja. 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan. 3. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang pengawasan. 4. Penghimpunan, pengolahan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan. 5. Penyusunan, penginventarisasian dan

Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
		<p>pengelolaan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.</p> <p>6. Penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan.</p> <p>7. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat.</p> <p>8. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Inspektorat.</p>
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang - undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.	<p>1. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.</p> <p>2. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.</p> <p>3. Pengumpulan dan penelaahan data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran inspektorat.</p> <p>4. Penyiapan dokumen dan pengolahan data pengawasan sebagai bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.</p> <p>5. Penyiapan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, dokumentasi dan pengolahan data</p>

Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
		<p>pengawasan.</p> <p>6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan.</p>
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.	<p>1. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.</p> <p>2. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.</p> <p>3. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan.</p> <p>4. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan.</p> <p>5. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan.</p> <p>6. Penyusunan statistik laporan hasil pengawasan.</p> <p>7. Pelaksanaan fasilitas dan kerjasama pengawasan.</p> <p>8. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan.</p>
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	Membantu Sekretaris dalam melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kehumasan dan protokol.	<p>1. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.</p> <p>2. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi dan umum.</p> <p>3. Pengelolaan urusan</p>

Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
		<p>keuangan.</p> <p>4. Pengelolaan urusan kepegawaian.</p> <p>5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kehumasan dan protokol.</p> <p>6. Pelaksanaan koordinasi penelaahan data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat.</p> <p>7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian administrasi dan umum.</p>
Inspektur Pembantu Wilayah	Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada satuan kerja perangkat daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.	<p>1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah kerjanya.</p> <p>2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya.</p> <p>3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.</p> <p>5. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas</p>

Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
		pengawasan. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur pembantu Wilayah.
Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Pelaksana teknis fungsional bidang Pengawasan dilingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. 2. Melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.
Jabatan Fungsional P2UPD	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan tugasnya keempat tim jabatan fungsional tersebut melekat pada satu Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL) dan mempunyai tanggungjawab pemeriksaan terhadap entitas (obrik) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL) masing-masing.

Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
	melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.	

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal (2020)

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 173 Slawi. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 5 Juni 2019 hingga 25 juni 2020.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, gambaran karakteristik data kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Karakteristik data kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	37	100%
Kuesioner yang kembali	35	94,59%
Kuesioner yang tidak kembali	2	
Kuesioner yang tidak lengkap	-	-
Kuesioner yang dapat diolah	35	94,59%

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kuesioner yang dibagikan sebanyak 37 eksemplar (100%). Dari jumlah kuesioner yang dibagikan tersebut, 35 (94,59 %) kuesioner dapat diperoleh kembali. Sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 35 kuesioner.

5. Deskripsi Responden

Deskripsi responden dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Deskripsi responden perlu untuk dilakukan mengetahui latar belakang responden berakitan dengan interpretasi hasil penelitian. Tabel 4.3 di bawah ini menyajikan data responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	20	57,15%
Perempuan	15	42,85%
Jumlah	35	100%

Sumber : data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 responden atau sebesar 57,15%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 responden atau sebesar 42,85%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden perempuan.

Tabel 4.4
Usia Responden

Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
20-25	2	5,72%
26-35	8	22,86%
36-45	22	62,85%
>46	3	8,57%
Jumlah	35	100%

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki usia 20-25 tahun sebanyak 2 orang, 26-35 tahun sebanyak 8 orang, berusia 36-45 tahun sebanyak 22 orang,

dan berusia lebih dari 46 tahun sebanyak 3 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 36-45 tahun.

Tabel 4.5
Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
D3	0	0%
S1	33	94,28%
S2	2	5,72%
S3	0	0%
Jumlah	35	100%

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 33 orang, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 2 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merupakan lulusan S1 dengan jumlah 33 orang atau 94,28% dari total responden. Responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik bila dibandingkan responden dengan tingkat pendidikan dibawahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas audit dengan baik.

Tabel 4.6
Lama Bekerja

Lama Bekerja (tahun)	Jumlah	Persentase
<1	0	0%
1-3	5	14,28%
4-10	22	62,86%
>10	8	22,86%
Jumlah	35	100%

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa lama responden yang memiliki masa bekerja pada rentang 1-3 tahun berjumlah 5 orang, responden dengan masa kerja 4-10 tahun sebanyak 22 orang, dan responden dengan masa kerja >10 tahun sebanyak 8 orang. Auditor dengan masa kerja yang lebih lama diyakini memiliki pengalaman kerja lebih baik dalam menjalankan praktik audit. Mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada masa kerja 14-10 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden merupakan auditor yang memiliki cukup pengalaman.

5. Hasil dan Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata (mean) dan standar deviasi dengan N merupakan sampel atau banyaknya responden dalam penelitian dari masing - masing variabel yaitu disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisi Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komitmen Kepala Daerah	35	31	48	39.94	4.511
Good Governance	35	32	49	39.37	3.758
Audit Kinerja Standar	35	32	49	40.63	4.570
Akuntansi Pemerintah	35	30	45	39.17	3.535
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	35	33	50	42.74	4.273
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Dari table 4.7 diatas dapat diketahui bahwa data penelitian ini sebanyak 35 responden. Berikut keterangan dari hasil analisis statistic deskriptif yang telah diolah sebagai berikut:

- 1) Variabel Komitmen Kepala Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 31, nilai maksimum sebesar 48, nilai rata-rata 39,94 dan standar defiasi sebesar 4,511. Dari hasil tersebut menunjukan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar defiasi, maka dapat

disimpulkan bahwa kualitas data komitmen kepala daerah adalah baik.

- 2) Variabel *Good Governance* mempunyai nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 49, nilai rata-rata 39,37 dan standar defiasi sebesar 3,758. Dari hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar defiasi, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data *Good Governance* adalah baik.
- 3) Variabel Audit Kinerja mempunyai nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 49, nilai rata-rata 40,63 dan standar defiasi sebesar 4,570. Dari hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar defiasi, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data Audit Kinerja adalah baik.
- 4) Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata 39,17 dan standar defiasi sebesar 3,535. Dari hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar defiasi, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data Standar Akuntansi Pemerintahan adalah baik.
- 5) Variabel Akuntabilitas Keuangan Pemerintah mempunyai nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata 42,74 dan standar defiasi sebesar 4,273. Dari hasil tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar defiasi,

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data Akuntabilitas Keuangan Pemerintah adalah baik.

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= $n-2$ dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai r hitung $> r$ tabel maka indikator pernyataan valid.
- Jika nilai r hitung $< r$ tabel maka indikator pernyataan tidak valid.
- Pada penelitian ini, jumlah sampel (n)= 35 sehingga besarnya $df= 35 - 2= 33$. Dengan $\alpha= 0,05$ maka diperoleh nilai r tabel= 0,334.

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 22.

Tabel 4.8
Uji Validitas

Variabel	Nomor Item	r Tabel	R Hitung	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (Y)	1	0,334	0,554	Valid
	2	0,334	0,586	Valid
	3	0,334	0,674	Valid
	4	0,334	0,665	Valid
	5	0,334	0,572	Valid
	6	0,334	0,744	Valid
	7	0,334	0,610	Valid
	8	0,334	0,521	Valid
	9	0,334	0,414	Valid
	10	0,334	0,427	Valid

Variabel	Nomor Item	r Tabel	R Hitung	Keterangan
Komitmen Kepala Daerah (X1)	1	0,334	0,409	Valid
	2	0,334	0,546	Valid
	3	0,334	0,645	Valid
	4	0,334	0,531	Valid
	5	0,334	0,614	Valid
	6	0,334	0,676	Valid
	7	0,334	0,491	Valid
	8	0,334	0,741	Valid
	9	0,334	0,506	Valid
	10	0,334	0,370	Valid
Good Governance (X2)	1	0,334	0,411	Valid
	2	0,334	0,345	Valid
	3	0,334	0,464	Valid
	4	0,334	0,408	Valid
	5	0,334	0,586	Valid
	6	0,334	0,711	Valid
	7	0,334	0,644	Valid
	8	0,334	0,592	Valid
	9	0,334	0,617	Valid
	10	0,334	0,337	Valid
Audit Kinerja (X3)	1	0,334	0,371	Valid
	2	0,334	0,574	Valid
	3	0,334	0,646	Valid
	4	0,334	0,685	Valid
	5	0,334	0,656	Valid
	6	0,334	0,657	Valid
	7	0,334	0,633	Valid
	8	0,334	0,456	Valid
	9	0,334	0,419	Valid
	10	0,334	0,504	Valid
Standar Akuntansi Pemerintahan (X4)	1	0,334	0,377	Valid
	2	0,334	0,717	Valid
	3	0,334	0,674	Valid
	4	0,334	0,498	Valid
	5	0,334	0,635	Valid
	6	0,334	0,619	Valid
	7	0,334	0,548	Valid
	8	0,334	0,624	Valid
	9	0,334	0,432	Valid

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

b. Uji Reabilitas

Untuk menguji keadaan dari kuesioner maka digunakannya reabilitas. Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil pengukurannya tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Kriteria pengujian uji reabilitas dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22 dengan nilai *Cronbach alpha* > 0,70 (Ghazali, 2016 : 48).

Teknik perhitungan reabilitas digunakan untuk mengetahui pernyataan pada kuesioner tersebut apakah reliabel atau tidak. Pengukuran reabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan kriteria level *significant* 95% (0,7) dengan ketentuan jika $y \text{ hitung} > r$ maka item pertanyaan tersebut reliabel dan apabila $y \text{ hitung} < r$ maka item pernyataan tersebut tidak reliabel.

Tabel 4.9
Uji Reabilitas

Variabel	r Hitung	Nilai <i>Cronbach's alpha</i>	Status
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (Y)	0,729	0,7	Reliabel

Komitmen Kepala Daerah (X1)	0,751	0,7	Reliabel
<i>Good Governance</i> (X2)	0,742	0,7	Reliabel
Audit Kinerja (X3)	0,759	0,7	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintahan (X4)	0,714	0,7	Reliabel

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Dari hasil perhitungan reabilitas variable Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (Y), Komitmen Kepala Daerah (X1), *Good Governance* (X2), Audit Kinerja (X3), Standar Akuntansi Pemerintahan (X4) diperoleh nilai reabilitas lebih besar bila dibandingkan dengan 0,7. Artinya *instrument variable* Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (Y), Komitmen Kepala Daerah (X1), *Good Governance* (X2), Audit Kinerja (X3), Standar Akuntansi Pemerintahan (X4) dinyatakan Reliabel.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan mewakili (*representative*), maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi yang meliputi:

1.) Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi variabel mengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2016) . Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik dengan uji *one sample*

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan cara menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya yaitu:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Uji ini dikatakan Normalitas apabila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal.

TABEL 4.10
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.07071456
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.067
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa uji normalitas menggunakan teknik analisis *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2.) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut:

- Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas.
- Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.11

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Komitmen Kepala Daerah	.160	6.240	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Good Governance	.322	3.107	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Audit Kinerja	.146	6.850	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Standar Akuntansi Pemerintah	.307	3.259	Tidak Terjadi Multikolinearitas

ndent Variabel : Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Sumber : Output Data SPSS Versi 22

Tabel 4.11 menunjukkan semua variabel memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF <10. Maka dapat disimpulkan tidak

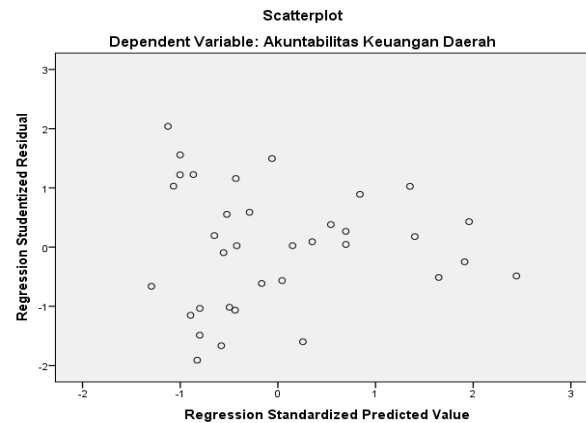
terjadi gejala multikolinieritas terhadap variabel-variabel independen, sehingga model regresi berganda dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka keadaan demikian mengidentifikasikan adanya gejala heterokedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka keadaan tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.3
Uji Heteroskadestisitas



Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola yang jelas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah dengan variabel terikat yaitu Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal. Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-1.204	2.267	
	Komitmen Kepala Daerah	.284	.108	.299
	Good Governance	.174	.092	.153
	Audit Kinerja	.341	.112	.365
	Standar Akuntansi Pemerintah	.304	.100	.252

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan Tabel 4.12 maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Pada kolom *unstandardized coefficient* (kolom B), tertera nilai konstanta sebesar -1,204, koefisien Komitmen Kepala Daerah sebesar 0,284, *Good Governance* sebesar 0,174, Audit Kinerja Sebesar 0,341, dan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,304. Dengan demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,284 X_1 + 0,174 X_2 + 0,341 X_3 + 0,304 X_4 - 1,204$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa:

- 1.) Konstanta sebesar -1,204 menyatakan bahwa jika variabel komitmen kepala daerah, *good governance*, audit kinerja, dan standar akuntansi pemerintah dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka akuntabilitas keuangan pemerintah akan menurun sebesar 1,204 satuan atau 12,04%.
- 2.) Koefisien regresi variabel komitmen kepala daerah (X_1) sebesar 0,284. Hal ini berarti bahwa jika variabel skeptisme profesional bertambah satu satuan maka variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah

akan meningkat sebesar 0,284 satuan atau 28,4%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

- 3.) Koefisien regresi variabel *Good Governance* (X2) sebesar 0,174. Hal ini berarti bahwa jika variable *Good Governance* bertambah satu satuan maka variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,174 satuan atau 17,4 %, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
- 4.) Koefisien regresi variable Audit Kinerja (X3) sebesar 0,341. Hal ini berarti bahwa jika variabel Audit Kinerja bertambah satu satuan maka variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,341 satuan atau 34,1%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
- 5.) Koefisien regresi variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X4) sebesar 0,304. Hal ini berarti bahwa jika variabel pengalaman bertambah satu satuan maka variabel akuntabilitas keuangan pemerintah akan menurun sebesar 0,304 satuan atau 30,4%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

5. Hasil Uji Hipotesis

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dari satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. Pada penelitian ini pengujian menggunakan

signifikansi level 0,025. Adapun Kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

- Nilai signifikansi $< 0,025$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).
- Nilai signifikansi $> 0,025$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan).

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.13
Uji statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.204	2.267		-.531	.599
Komitmen Kepala Daerah	.284	.108	.299	2.619	.014
Good Governance	.174	.092	.153	1.895	.068
Audit Kinereja	.341	.112	.365	3.050	.005
Standar Akuntansi Pemerintahan	.304	.100	.252	3.047	.005

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Olah Data SPSS Versi 22

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.13 diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1.) Pengaruh Komitmen Kepala Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Komitmen Kepala Daerah memiliki nilai signifikansi $0,014 < 0,025$. Hal ini berarti variable Komitmen Kepala Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

2.) Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Good Governance memiliki nilai signifikansi $0,068 > 0,025$. Hal ini berarti variabel *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak .

Good Governance tidak berpengaruh karena jumlah pernyataan kuesioner dan jumlah responden pada penelitian ini sedikit. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah item pernyataan dan jumlah responden untuk mempengaruhi tingkat signifikansinya.

3.) Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Audit Kinerja memiliki nilai signifikansi $0,005 < 0,025$. Hal ini berarti variabel Audit Kinerja berpengaruh positif

terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H3 diterima .

4.) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai signifikansi $0,005 < 0,025$. Hal ini berarti variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2016:95). Nilai R^2 terletak antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Koefisien determinasi dapat dihitung untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan. Jika proses mendapatkan nilai R^2 yang tinggi maka hasilnya adalah baik, tetapi jika nilai R^2 rendah bukan berarti model regresi jelek. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,622 ^a	,396	,387	2,039

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Audit Kinerja, Komitmen Kepala Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Sumber : Output SPSS Versi 22

Pada tabel 4.14 didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,387 atau atau 38,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh variabel Komitmen Kepala Daerah, Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 38,7%. Sedangkan 61,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

6. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini secara ringkas disajikan sebagai berikut:

1. Komitmen Kepala Daerah berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil uji t variabel Komitmen Kepala Daerah diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,025. Maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Komitmen kepala daerah dikatakan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah karena dengan adanya sebuah komitmen yang baik dari kepala daerah yang tidak lain sebagai penentu kebijakan dapat menjaga dan meningkatkan komitmen serta pengetahuan melalui berbagai kesempatan seperti memberikan pelatihan-pelatihan atau pendidikan profesi terhadap pengetahuan akuntansi untuk para karyawan dan jajarannya sehingga dapat melakukan pengawasan yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Pengawasan yang baik terhadap LKPD akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan terciptanya laporan keuangan yang berkualitas maka keuangan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel (Allen, dkk 1993).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yahya, 2017), yang menyatakan bahwa Komitmen Kepala Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

2. Penerapan *Good Governance* Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil uji t variabel *Good Governance* diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,068 lebih besar dari 0,025. Maka H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Good Governance tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukan bahwa pemahaman dan implementasi standar akuntansi keuangan dan kinerja audit yang dominan mempengaruhi akuntabilitas keuangan dibandingkan *Good Governance*. Akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan tujuan penting dari reformasi sektor public. Meskipun didalam komponen *Good Governance* salah satunya ditentukan oleh akuntabilitas tetapi kedua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan reformasi hukum sehingga perlu ditingkatkan kembali transparansi kepada publik atau masyarakat agar mengetahui kinerja yang telah dicapai dan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik secara jelas dan transparan (Zeyn Elvira, 2011).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeyn Elvira, (2011) dan Friyani Rita, (2017) yang membuktikan bahwa penerapan *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, namun berbeda dengan hasil dari penelitian Suratmi, (2014) dan Azlim, dkk (2012) yang menunjukan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

3. Audit Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil uji t variabel Audit Kinerja diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,025. Maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Audit Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Audit Kinerja dikatakan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah karena audit kinerja merupakan salah satu bentuk dari sistem pengendalian intern sebuah organisasi / instansi untuk menjaga profesionalitas, produktifitas karyawan, serta akuntabilitas. Tidak terkecuali untuk organisasi sektor publik seperti Inspektorat Kabupaten Tegal yang harus dijaga dan dikendalikan karena pegawai pemerintah ini merupakan pengelola dari dana masyarakat. Dengan adanya audit kinerja yang baik maka akan mengetahui strategi manajemen yang telah dilaksanakan sudah berjalan sesuai rencana atau strategi tersebut telah diterapkan di Inspektorat Kabupaten Tegal (Azlim, dkk, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suratmi, (2014), Darmanto F.K, (2017) dan Azlim, dkk (2012) yang menyatakan bahwa Audit Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.

4. Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil uji t variabel Standar Akuntansi Pemerintah diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,025. Maka H_0 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Standar Akuntansi Pemerintah dikatakan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah karena kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan harus memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh SAP, untuk mendapatkan kualitas LKPD yang baik maka didalamnya harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan karena hal ini sangat berguna untuk penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal (Darmanto F.K, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi R.R, (2016), Friyani Rita, (2017), dan Darmanto F.K, (2017) yang memperoleh kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Komitmen Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Dengan adanya sebuah komitmen yang baik dari kepala daerah yang tidak lain sebagai penentu kebijakan dapat menjaga dan meningkatkan komitmen serta pengetahuan akuntansi untuk para karyawan dan jajarannya agar dapat melakukan pengawasan yang baik terhadap LKPD sehingga keuangan pemerintah tetap akuntabel.
2. *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini dikarenakan komitmen kepala daerah, pemahaman dan implementasi standar akuntansi keuangan serta kinerja audit lebih dominan mempengaruhi akuntabilitas keuangan dibandingkan *Good Governance*.
3. Audit Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Audit kinerja berpengaruh positif karena merupakan salah satu bentuk dari

sistem pengendalian intern sebuah organisasi / instansi untuk menjaga profesionalitas, akuntabilitas, serta produktifitas karyawan.

4. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Hal ini karena kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan harus memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh SAP.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintahan Kabupaten Tegal, khususnya kepala daerah dikabupaten Tegal walaupun komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan komitmen kepala daerah dan Kinerja Audit yang akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat mencapai keuangan pemerintahan yang akuntabel.
2. Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan perlu ditingkatkan lagi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Agar sistem keuangan dapat terwujud dengan baik maka diperlukan peningkatan sumberdaya

manusia yang kompeten untuk melaksanakannya. Hal ini bisa dengan cara menempatkan sumber daya manusia dengan latar belakang akuntansi dan juga dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang Akuntansi Pemerintahan.

3. Sebaiknya Inspektorat Kabupaten Tegal memberi pelatihan-pelatihan kepada auditor yang sudah ada agar lebih dalam memahami peraturan perundang-undangan yang digunakan pada saat pelaksanaan audit sehingga auditor akan lebih mudah mengkomunikasikan temuannya kepada Kepala Dinas.
4. Penelitin selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian selain kuesioner, seperti metode wawancara yang dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan responden dan mendapatkan kejujuran jawaban dari responden.
5. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel independen atau faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian peneliti. Penelitin ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Tegal. Disarankan untuk penelitian selanjutnya memperluas atau memperbanyak jumlah sampel yang diteliti untuk memperkuat hasil penelitian serta memperhatikan ketepatan pemilihan kuesioner.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan 38,7% faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah, sedangkan 61,3% yaitu faktor lain diluar penelitian ini belum dapat dijelaskan.
2. Peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan responden dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan karena adanya pembatasan sosial berskala besar akibat *covid-19* selama proses penelitian sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui instrumen secara tertulis.
3. Jumlah responden hanya 35 orang, tentunya lebih baik lagi jika responden lebih banyak agar menggambarkan keadaan sesungguhnya yang lebih tepat.
4. Objek penelitian hanya difokuskan pada satu instansi yaitu Kantor Insepektorat Kabupaten Tegal yang mana hanya satu dari sekian banyak instansi yang ada di Kabupaten Tegal.
5. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, pemahaman dan anggapan yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1993). Organizational commitment: Evidence of career stage effects? *Journal of Business Research*, 26(1), 49–61. [https://doi.org/10.1016/0148-2963\(93\)90042-N](https://doi.org/10.1016/0148-2963(93)90042-N)
- Bastian, I. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beton, P. (2000). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja*. 15(1), 13–28.
- Buchanan, B. (1974). *Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organization*. *Administrative Science Quarterly*.
- BPKB dan LAN. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN.
- Bruno, L. (2019). *Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ghazali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- LAN. (2013). *Lembaga administrasi negara 2013*.
- Laolo, L. (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*.
- Lukito, P. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Maestro, P. C., & (2013). (n.d.). *Pengaruh Audit Kinerja terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor*. 1–6.
- Mahlil, dkk, (2017). *Pengaruh komitmen kepala daerah dan pengetahuan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi aceh 1,2*. 2(2).
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Michaels, G. (1997). *Handbook of Distance Education: Secound Edition*. USA: Lawrence Erlbaum Associates.

- Putu, N., Merta, Y., Sari, M., Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2014). (*SAP*) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (*Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana*). 2(1).
- Purbaya, A. A. (2019, December). [https://news.detik.com](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4816038/brebes-jadi-satu-satunya-daerah-yang-belum-wtp-di-jateng). Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4816038/brebes-jadi-satu-satunya-daerah-yang-belum-wtp-di-jateng>
- Rinaldi, R. R. (2016). *Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Universitas Muhamadiyah Surakarta, 1–12.
- Suratmi, N. M. (2014). *Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 2(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2882>
- Steers, R. (1988). *Motivation and Work Behavior 3rd Edition*. USA: McGraw-Hill Book Company.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyatno, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan (Plus Duabelas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV. Media Brilian.
- Taliziduhu, N. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pengetahuan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulum, I. (2009). *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahya, M. (2017). *Pengaruh Audit Tenure, Audit Delay, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Opini Shopping Terhadap Penerimaan Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI*.
- Zeyn, Elvira. (2011). *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Trikonomika, 10(1), 52–62.

LAMPIRAN

Lembar Kuesioner

Kuesioner Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan Good Governance, Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal

Yth. Bapak/Ibu
Responden Penelitian

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, maka saya:

Nama : Pipit Ayuning Pramesti

NPM : 4316500139

Mengajukan permohonan Kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar. Perlu saya sampaikan dalam pengisian kuesioner ini :

1. Tidak ada jawaban yang benar atau salah
2. Penilaian yang obyektif sangat diharapkan, karena akan menjadi umpan balik bagi pengembangan penelitian tentang akuntabilitas keuangan pemerintah daerah

3. Setiap jawaban sangat bermakna bagi kami, sehingga kami mengharapkan tidak ada jawaban yang dikosongkan
4. Jawaban akan diperlakukan dengan standar profesionalitas dan etika penelitian
Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaanya. Atas waktu dan kerjasama Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Pipit Ayuning Pramesti

NPM. 4316500139

LEMBAR KUESIONER

A. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jabatan :
6. Masa Kerja :

Petunjuk Pengisian :

- 1) Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembar daftar kuesioner.
 - 2) Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup memberikan tanda centang () pada kolom jawaban yang tersedia yaitu: SS, S, KS, TS, STS
- Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 3 Kurang Setuju (KS)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
AKUNTABILITAS HUKUM & KEJUJURAN						
1	Instansi di tempat saya bekerja adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya dalam menjalankan tugasnya					
2	Instansi di tempat saya bekerja mampu menghindar apabila terjadi penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.					
AKUNTABILITAS KEBIJAKAN						
3	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan organisasinya secara efektif dan efisien.					
4	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan kegiatan dan proses rencana kerja dengan baik.					
AKUNTABILITAS MENEJERIAL						
5	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan.					
6	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas pencapaian hasil yang diharapkan dari setiap pelaksanaan programnya dan dampaknya dimasa depan.					
AKUNTABILITAS PROGRAM						
7	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.					
8	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas pencapaian					

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	hasil yang diharapkan dari setiap pelaksanaan programnya secara efektif.					
AKUNTABILITAS FINANSIAL						
9	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.					
10	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK kepada masyarakat secara terbuka.					

2. KOMITMEN KEPALA DAERAH

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

NO	Pertanyaan	SS		S	KS	TS	STS
KOMITMEN AFEKTIF							
1	Saya merasa menjadi keluarga dalam organisasi ini dan percaya sepenuhnya kepada pemimpin saya.						
2	Saya menaati pimpinan serta merasa senang dan bangga untuk menghabiskan karir saya di organisasi ini.						
KOMITMEN BERKELANJUTAN							
3	Saya sangat mempercayai pimpinan dan anggota dari instansi atau organisasi tempat saya bekerja.						
4	Akan sangat berat bagi saya untuk meninggalkan instansi atau organisasi ini sekarang, sekalipun saya menginginkannya.						
5	Saat ini tetap bekerja di instansi atau organisasi ini merupakan kebutuhan sekaligus						

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
3	Instansi tempat saya bekerja sudah menggunakan sistem informasi dan pelayanan yang baik dengan masyarakat.					
4	Instansi tempat saya bekerja selalu menyampaikan penggunaan dari kas dinas kepada masyarakat secara terbuka.					
PENERAPAN HUKUM						
5	Instansi tempat saya bekerja selalu menindak tegas terhadap pegawai atau pemimpin yang menyalah gunakan wewenang.					
6	Instansi tempat saya bekerja selalu menindak tegasi pegawai yang melakukan pelanggaran pada kedisiplinan dalam bekerja.					
RESPONSIFITAS						
7	Instansi tempat saya bekerja telah aktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.					
8	Instansi tempat saya bekerja selalu mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan.					
EFISIEN DAN EFEKTIF						
9	Penggunaan sumberdaya pada instansi tempat saya bekerja sudah dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan setiap kegiatan instansi.					
10	Pengelolaan sumberdaya publik pada instansi tempat saya bekerja sudah dilakukan secara berguna (efisien) dan berhasil (efektif).					

4. AUDIT KINERJA

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
STRUKTUR AUDIT						
1	Auditor sudah melakukan langkah-langkah, prosedur, rangkaian logis, keputusan dan dokumentasi dengan benar pada setiap pekerjaannya.					
2	Auditor selalu komprehensif dan terintegritas dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.					
KETIDAKJELASAN PERAN						
3	Tidak ada kejelasan sehubungan dengan ekspektasi pekerjaan saya karena kurangnya informasi yang diperlukan.					
4	Saya memperoleh kejelasan mengenai deskripsi tugas dari pekerjaan yang saya kerjakan.					
GAYA KEPEMIMPINAN						
5	Saya disiplin karena pemimpin saya mencontohkan kedisiplinan terhadap semua anggotanya.					
6	Auditor selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat dan tepat waktu.					
BUDAYA ORGANISASI						
7	Instansi tempat saya bekerja memiliki nilai-nilai kebiasaan yang membedakannya dengan instansi-instansi yang lainnya					
8	Instansi tempat saya bekerja menghargai setiap budaya yang dimiliki oleh anggotanya untuk kemajuan organisasi.					
INDEPENDENSI AUDITOR						
9	Laporan audit tidak dipengaruhi oleh siapapun dan sesuai dengan hasil yang diperoleh serta bersifat netral.					
10	Dalam membuat laporan keuangan auditor mengambil tindakan dan keputusannya sendiri.					

5. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
RELEVAN						
1	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback</i>).					
2	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
ANDAL						
3	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya.					
4	Informasi yang saya sajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
5	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					
DAPAT DIBANDINGKAN						
6	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
7	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP sari tahun					

NO	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	ketahun.					
DAPAT DIPAHAMI						
8	Laporan keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dapat dipahami.					
9	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang sudah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

LAMPIRAN
DATA VARIABEL KOMITMEN KEPALA DAERAH

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	SKOR_X1
1	4	5	3	5	5	5	5	5	4	5	46
2	3	4	4	5	4	5	3	5	4	4	41
3	4	3	5	3	5	4	3	5	5	4	41
4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	3	43
5	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	34
6	4	5	5	5	5	3	5	4	3	4	43
7	3	3	3	4	3	3	5	4	5	4	37
8	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	42
9	4	4	5	4	4	4	5	5	5	3	43
10	3	3	4	4	4	4	5	3	4	4	38
11	4	3	3	5	4	5	3	5	5	5	42
12	4	3	3	4	4	5	4	3	4	3	37
13	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	32
14	3	3	2	3	3	3	4	2	4	4	31
15	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	47
16	4	3	3	3	4	3	5	3	4	3	35
17	4	4	4	5	3	3	3	3	5	3	37
18	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
19	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4	37
20	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
21	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	40
22	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	38
23	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	32
24	3	4	4	3	4	4	4	5	5	5	41
25	3	4	5	3	5	5	4	3	3	3	38
26	4	5	4	4	3	4	3	5	5	3	40
27	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
28	2	3	3	5	5	3	2	4	5	5	37

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	SKOR_X1
29	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	43
30	4	5	4	3	4	3	2	4	3	4	36
31	3	5	4	4	3	5	4	5	5	4	42
32	5	5	3	3	5	3	3	3	3	3	36
33	3	3	5	4	4	3	5	4	4	4	39
34	4	4	5	4	5	5	5	4	5	3	44
35	4	4	3	5	5	5	4	5	5	4	44

LAMPIRAN
DATA VARIABEL *GOOD GOVERNANCE*

N O	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2.1 0	SKOR_ X2
1	4	3	4	5	5	4	4	4	4	3	40
2	4	5	3	3	4	4	3	3	4	4	37
3	5	3	4	4	4	3	3	3	4	4	37
4	4	5	4	4	3	3	3	3	4	4	37
5	5	4	3	3	3	3	3	3	4	4	35
6	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	46
7	4	5	3	4	3	4	3	3	3	3	35
8	4	4	4	3	4	3	4	4	5	5	40
9	3	4	3	4	4	5	4	5	5	4	41
10	4	4	3	3	4	3	5	4	3	5	38
11	3	4	4	4	4	5	5	3	5	4	41
12	5	4	4	5	4	4	5	4	4	3	42
13	3	4	4	4	3	4	4	5	3	5	39
14	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	33
15	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	40
16	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	34
17	4	5	3	5	4	4	3	4	3	4	39
18	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	46
19	5	4	3	5	3	5	5	4	4	4	42
20	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
21	4	3	3	3	5	5	5	5	3	4	40
22	4	4	3	3	5	5	5	4	3	4	40
23	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	32
24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39

N O	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	X2. 5	X2. 6	X2. 7	X2. 8	X2. 9	X2.1 0	SKOR_ X2
25	4	3	5	5	3	4	3	3	4	3	37
26	5	3	3	3	5	5	3	4	5	5	41
27	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	35
28	4	3	5	3	3	4	4	4	3	3	36
29	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	43
30	4	5	3	4	5	3	5	3	4	2	38
31	3	4	4	3	5	5	4	5	4	5	42
32	5	4	5	4	4	3	3	3	3	4	38
33	5	3	3	4	4	4	5	5	4	3	40
34	3	4	5	5	5	4	3	4	4	4	41
35	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	45

LAMPIRAN
DATA VARIABEL AUDIT KINERJA

N 0	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	X3. 7	X3. 8	X3. 9	X3.1 0	SKOR_ X3
1	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	47
2	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4	42
3	5	3	3	3	5	2	3	4	4	5	37
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	4	35
6	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	46
7	5	5	4	3	3	3	3	3	5	4	38
8	5	3	4	4	5	4	4	4	5	5	43
9	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	44
10	3	3	4	3	5	4	4	5	4	4	39
11	5	5	3	3	4	3	3	3	5	5	39
12	5	3	5	4	3	3	4	3	4	4	38
13	5	4	4	3	3	3	4	4	3	4	37
14	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	32
15	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	47
16	5	3	3	3	4	3	3	4	4	3	35
17	5	5	2	2	2	4	5	4	4	5	38
18	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
19	5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	39
20	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
21	4	4	4	3	4	3	4	5	5	3	39
22	5	4	2	4	4	5	5	5	4	4	42
23	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	32
24	3	4	3	4	3	5	4	4	5	4	39

N 0	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	X3. 7	X3. 8	X3. 9	X3.1 0	SKOR_ X3
25	5	4	4	5	3	4	3	3	4	3	38
26	4	4	3	5	5	4	5	5	5	4	44
27	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	48
28	4	3	3	4	3	4	2	4	5	4	36
29	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	44
30	4	3	4	3	3	4	4	3	5	4	37
31	5	5	3	3	5	3	3	5	5	5	42
32	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5	37
33	5	2	4	5	4	5	5	4	5	4	43
34	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	45
35	5	5	5	5	3	3	4	3	5	5	43

LAMPIRAN

DATA VARIABEL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

NO	X4. 1	X4. 2	NO	X4. 4	X4. 5	X4. 6	X4. 7	X4. 8	X4. 9	SKOR_ X4
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	4	5	5	5	4	5	5	4	4	41
3	5	5	5	4	5	4	4	5	5	42
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	41
5	5	3	4	4	4	3	4	3	4	34
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
7	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38
8	3	3	5	4	4	5	5	4	4	37
9	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
10	3	4	5	5	4	4	5	5	4	39
11	5	5	5	5	5	4	5	4	3	41
12	4	5	5	4	5	5	5	5	5	43
13	5	4	4	5	3	4	5	5	4	39
14	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
15	4	5	5	4	5	5	5	4	4	41
16	4	4	4	4	3	3	4	3	4	33
17	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
19	4	5	5	3	3	5	5	5	5	40
20	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
21	4	4	5	5	5	5	4	5	4	41
22	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35

NO	X4. 1	X4. 2	NO	X4. 4	X4. 5	X4. 6	X4. 7	X4. 8	X4. 9	SKOR_ X4
23	5	3	4	3	3	3	3	3	3	30
24	4	4	4	5	4	4	5	4	4	38
25	4	4	3	4	4	4	5	4	5	37
26	4	5	5	3	5	3	5	5	5	40
27	2	3	5	5	5	5	5	5	4	39
28	2	2	4	4	5	5	5	4	5	36
29	3	5	5	5	5	5	5	4	4	41
30	4	4	4	4	3	4	5	4	4	36
31	5	5	5	4	5	5	4	4	4	41
32	5	3	3	5	3	3	5	5	5	37
33	5	5	4	4	4	5	4	5	3	39
34	4	5	5	4	4	3	5	5	5	40
35	5	4	5	5	5	5	5	4	4	42

LAMPIRAN

DATA VARIABEL AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

NO	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	SKOR_Y
1	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
2	4	5	4	5	5	4	3	5	5	3	43
3	3	4	5	5	5	5	5	5	3	3	43
4	3	3	4	5	5	4	5	5	5	4	43
5	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	35
6	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
7	3	3	4	3	4	4	4	4	5	5	39
8	4	4	5	4	5	4	3	5	5	4	43
9	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	45
10	3	4	4	5	3	3	5	3	5	5	40
11	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	45
12	5	3	5	4	5	5	5	4	4	4	44
13	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	39
14	4	3	3	3	4	3	3	3	5	3	34
15	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	47
16	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	35
17	4	5	4	3	3	4	5	3	5	5	41
18	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
19	3	4	5	4	4	4	4	5	4	5	42
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	42
22	5	5	5	4	5	4	4	5	3	3	43

NO	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	SKOR_Y
23	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	33
24	5	5	5	4	4	3	5	5	4	4	44
25	4	3	4	3	4	5	4	5	5	4	41
26	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47
27	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	48
28	3	3	2	5	5	3	5	5	5	3	39
29	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	46
30	4	4	4	4	4	3	4	3	5	5	40
31	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3	46
32	4	5	4	4	5	4	4	4	4	2	40
33	4	3	5	5	5	5	5	5	4	3	44
34	4	5	5	5	5	5	4	5	5	2	45
35	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	45

LAMPIRAN
DATA UJI VALIDITAS VARIABEL KOMITMEN KEPALA DAERAH

Correlations											
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	SKOR _X1
X1.1 Pearson Correlation	1	.448**	.273	-.061	.348*	.287	.156	.069	-.035	-.157	.409*
Sig. (2-tailed)		.007	.112	.729	.041	.094	.372	.694	.842	.369	.015
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.2 Pearson Correlation	.448**	1	.414*	.225	.299	.255	.074	.362*	-.035	.031	.546**
Sig. (2-tailed)	.007		.013	.194	.081	.139	.672	.033	.842	.860	.001
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.3 Pearson Correlation	.273	.414*	1	.160	.440**	.304	.351*	.398*	.175	-.017	.645**
Sig. (2-tailed)	.112	.013		.357	.008	.076	.038	.018	.314	.925	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.4 Pearson Correlation	-.061	.225	.160	1	.152	.263	.111	.371*	.287	.455**	.531**
Sig. (2-tailed)	.729	.194	.357		.384	.127	.524	.028	.095	.006	.001
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.5 Pearson Correlation	.348*	.299	.440**	.152	1	.393*	.255	.300	.074	.197	.614**
Sig. (2-tailed)	.041	.081	.008	.384		.019	.140	.080	.675	.256	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.6 Pearson Correlation	.287	.255	.304	.263	.393*	1	.263	.477**	.316	.168	.676**

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	SKOR _X1
Sig. (2-tailed)	.094	.139	.076	.127	.019		.126	.004	.064	.334	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.7 Pearson Correlation	.156	.074	.351*	.111	.255	.263	1	.179	.208	-.048	.491**
Sig. (2-tailed)	.372	.672	.038	.524	.140	.126		.305	.231	.786	.003
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.8 Pearson Correlation	.069	.362*	.398*	.371*	.300	.477**	.179	1	.583**	.344*	.741**
Sig. (2-tailed)	.694	.033	.018	.028	.080	.004	.305		.000	.043	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.9 Pearson Correlation	-.035	-.035	.175	.287	.074	.316	.208	.583**	1	.203	.506**
Sig. (2-tailed)	.842	.842	.314	.095	.675	.064	.231	.000		.243	.002
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X1.10 Pearson Correlation	-.157	.031	-.017	.455**	.197	.168	-.048	.344*	.203	1	.370*
Sig. (2-tailed)	.369	.860	.925	.006	.256	.334	.786	.043	.243		.029
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
SKOR_X1 Pearson Correlation	.409*	.546**	.645**	.531**	.614**	.676**	.491**	.741**	.506**	.370*	1
Sig. (2-tailed)	.015	.001	.000	.001	.000	.000	.003	.000	.002	.029	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN
DATA UJI VALIDITAS
VARIABEL *GOOD GOVERNANCE*

[illegible]

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	SKOR _X2
X2.6 Pearson Correlation	-.055	.006	.149	.185	.418*	1	.494**	.582**	.397*	.187	.711**
Sig. (2-tailed)	.752	.974	.393	.287	.012		.003	.000	.018	.283	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.7 Pearson Correlation	.104	.036	.061	.117	.358*	.494**	1	.492**	.309	.044	.644**
Sig. (2-tailed)	.551	.836	.727	.502	.035	.003		.003	.071	.802	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.8 Pearson Correlation	-.098	-.129	.108	-.017	.371*	.582**	.492**	1	.193	.310	.592**
Sig. (2-tailed)	.574	.459	.538	.923	.028	.000	.003		.267	.070	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.9 Pearson Correlation	.082	.080	.232	.173	.330	.397*	.309	.193	1	.209	.617**
Sig. (2-tailed)	.641	.649	.179	.321	.053	.018	.071	.267		.228	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.10 Pearson Correlation	-.055	.000	.097	-.241	.100	.187	.044	.310	.209	1	.337*
Sig. (2-tailed)	.755	1.000	.578	.163	.567	.283	.802	.070	.228		.048
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
SKOR_X2 Pearson Correlation	.211	.245	.464**	.408*	.586**	.711**	.644**	.592**	.617**	.337*	1
Sig. (2-tailed)	.225	.156	.005	.015	.000	.000	.000	.000	.000	.048	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN
DATA UJI VALIDITAS DAN REABILITAS
VARIABEL AUDIT KINERJA

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	SKOR _X2
X3.1	Pearson Correlation	1	.322	.286	.197	.118	-.034	.231	-.087	-.095	.297	.371 [*]
	Sig. (2- tailed)		.059	.096	.257	.498	.848	.183	.620	.585	.084	.028
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.2	Pearson Correlation	.322	1	.374 [*]	.291	.215	.187	.192	.083	.106	.376 [*]	.574 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.059		.027	.090	.215	.282	.270	.637	.545	.026	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.3	Pearson Correlation	.286	.374 [*]	1	.622 ^{**}	.363 [*]	.296	.260	-.007	.096	.106	.646 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.096	.027		.000	.032	.085	.131	.969	.582	.545	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.4	Pearson Correlation	.197	.291	.622 ^{**}	1	.389 [*]	.507 ^{**}	.318	.077	.157	.066	.685 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.257	.090	.000		.021	.002	.063	.661	.367	.708	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.5	Pearson Correlation	.118	.215	.363 [*]	.389 [*]	1	.216	.220	.535 ^{**}	.158	.351 [*]	.656 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.498	.215	.032	.021		.212	.205	.001	.366	.039	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.6	Pearson Correlation	-.034	.187	.296	.507 ^{**}	.216	1	.619 ^{**}	.384 [*]	.219	.143	.657 ^{**}

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	SKOR _X2
Sig. (2-tailed)	.848	.282	.085	.002	.212		.000	.023	.207	.411	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.7 Pearson Correlation	.231	.192	.260	.318	.220	.619**	1	.392*	.024	.209	.633**
Sig. (2-tailed)	.183	.270	.131	.063	.205	.000		.020	.890	.228	.000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.8 Pearson Correlation	-.087	.083	-.007	.077	.535**	.384*	.392*	1	-.031	.121	.456**
Sig. (2-tailed)	.620	.637	.969	.661	.001	.023	.020		.858	.489	.006
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.9 Pearson Correlation	-.095	.106	.096	.157	.158	.219	.024	-.031	1	.356*	.419
Sig. (2-tailed)	.585	.545	.582	.367	.366	.207	.890	.858		.036	.062
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3.10 Pearson Correlation	.297	.376*	.106	.066	.351*	.143	.209	.121	.356*	1	.504**
Sig. (2-tailed)	.084	.026	.545	.708	.039	.411	.228	.489	.036		.002
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
SKOR_X2 Pearson Correlation	.371*	.574**	.646**	.685**	.656**	.657**	.633**	.456**	.319	.504**	1
Sig. (2-tailed)	.028	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.062	.002	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN
DATA UJI VALIDITAS
VARIABEL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	SKOR _X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.459**	.038	.065	-.084	-.169	-.225	.016	-.024	.377
	Sig. (2-tailed)		.005	.829	.709	.632	.332	.193	.929	.891	.107
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.2	Pearson Correlation	.459**	1	.580**	.083	.293	.259	.213	.365*	.170	.717**
	Sig. (2-tailed)	.005		.000	.637	.087	.134	.219	.031	.328	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.3	Pearson Correlation	.038	.580**	1	.165	.468**	.440**	.256	.316	.103	.674**
	Sig. (2-tailed)	.829	.000		.345	.005	.008	.138	.064	.557	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.4	Pearson Correlation	.065	.083	.165	1	.310	.331	.388*	.262	-.030	.498**
	Sig. (2-tailed)	.709	.637	.345		.070	.052	.021	.129	.866	.002
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.5	Pearson Correlation	-.084	.293	.468**	.310	1	.526**	.222	.212	.202	.635**
	Sig. (2-tailed)	.632	.087	.005	.070		.001	.199	.222	.245	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.6	Pearson Correlation	-.169	.259	.440**	.331	.526**	1	.346*	.294	.097	.619**
	Sig. (2-tailed)	.332	.134	.008	.052	.001		.042	.086	.579	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.7	Pearson Correlation	-.225	.213	.256	.388*	.222	.346*	1	.415*	.459**	.548**

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	SKOR _X4
	Sig. (2-tailed)	.193	.219	.138	.021	.199	.042		.013	.006	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.8	Pearson Correlation	.016	.365*	.316	.262	.212	.294	.415*	1	.412*	.624**
	Sig. (2-tailed)	.929	.031	.064	.129	.222	.086	.013		.014	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4.9	Pearson Correlation	-.024	.170	.103	-.030	.202	.097	.459**	.412*	1	.432**
	Sig. (2-tailed)	.891	.328	.557	.866	.245	.579	.006	.014		.010
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
SKOR _X4	Pearson Correlation	.277	.717**	.674**	.498**	.635**	.619**	.548**	.624**	.432**	1
	Sig. (2-tailed)	.107	.000	.000	.002	.000	.000	.001	.000	.010	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN
DATA UJI VALIDITAS
VARIABEL AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	SKO R_Y
Y.1 Pearson Correlation	1	.491**	.415*	.157	.213	.343*	.224	.023	.038	.105	.554**
Sig. (2- tailed)		.002	.012	.360	.213	.041	.189	.896	.826	.542	.000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.2 Pearson Correlation	.491**	1	.331*	.419*	.100	.355*	.202	.154	.129	-.044	.586**
Sig. (2- tailed)	.002		.049	.011	.560	.034	.237	.371	.453	.801	.000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.3 Pearson Correlation	.415*	.331*	1	.324	.413*	.550**	.271	.309	-.040	.117	.674**
Sig. (2- tailed)	.012	.049		.054	.012	.001	.110	.067	.817	.498	.000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.4 Pearson Correlation	.157	.419*	.324	1	.518**	.406*	.429**	.405*	.181	-.130	.665**
Sig. (2- tailed)	.360	.011	.054		.001	.014	.009	.014	.289	.449	.000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.5 Pearson Correlation	.213	.100	.413*	.518**	1	.496**	.223	.518**	-.005	-.239	.572**
Sig. (2- tailed)	.213	.560	.012	.001		.002	.190	.001	.978	.160	.000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.6 Pearson Correlation	.343*	.355*	.550**	.406*	.496**	1	.414*	.433**	.140	-.047	.744**

Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	SKO R_Y
Sig. (2-tailed)	.041	.034	.001	.014	.002		.012	.008	.416	.784	.000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.7 Pearson Correlation	.224	.202	.271	.429**	.223	.414*	1	.194	.135	.258	.610**
Sig. (2-tailed)	.189	.237	.110	.009	.190	.012		.257	.434	.128	.000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.8 Pearson Correlation	.023	.154	.309	.405*	.518**	.433**	.194	1	-.007	-.150	.521**
Sig. (2-tailed)	.896	.371	.067	.014	.001	.008	.257		.967	.384	.001
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.9 Pearson Correlation	.038	.129	-.040	.181	-.005	.140	.135	-.007	1	.193	.414
Sig. (2-tailed)	.826	.453	.817	.289	.978	.416	.434	.967		.259	.063
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y.10 Pearson Correlation	.105	-.044	.117	-.130	-.239	-.047	.258	-.150	.193	1	.427
Sig. (2-tailed)	.542	.801	.498	.449	.160	.784	.128	.384	.259		.184
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
SKO R_Y Pearson Correlation	.554**	.586**	.674**	.665**	.572**	.744**	.610**	.521**	.314	.227	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.063	.184	
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TABEL UJI REABILITAS

X1 (KOMITMEN KEPALA DAERAH)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	10

X2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	10

X3 (AUDIT KINERJA)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	10

LAMPIRAN DATA OUTPUT SPSS

1. UJI ASUMSI KLASIK

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

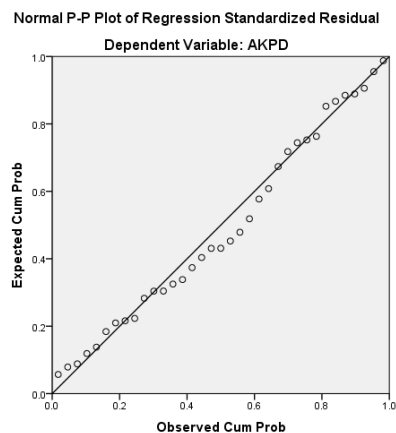
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.07071456
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.067
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

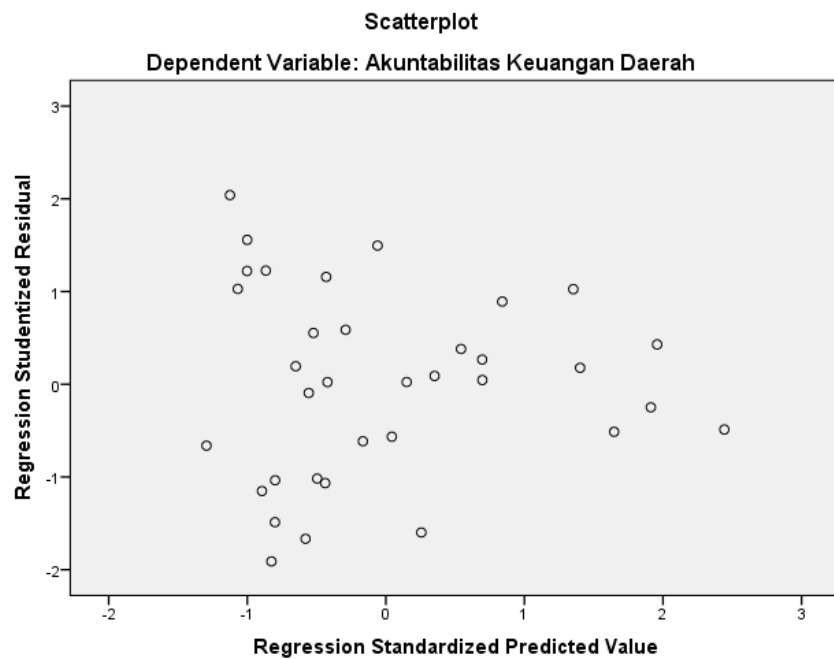
d. This is a lower bound of the true significance.



2. UJI MULTIKOLINEARITAS

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Komitmen Kepala Daerah	.160	6.240	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Good Governance	.322	3.107	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Audit Kinerja	.146	6.850	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Standar Akuntansi Pemerintah	.307	3.259	Tidak Terjadi Multikolinearitas

3. UJI HETEROKEDASTISITAS



4. UJI ANALISIS LINEAR BERGANDA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-1.204	2.267	
	Komitmen Kepala Daerah	.284	.108	.299
	Good Governance	.174	.092	.153
	Audit Kinerja	.341	.112	.365
	Standar Akuntansi Pemerintah	.304	.100	.252

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.968 ^a	.937	.929	1.140	.937	111.928	4	30	.000	1.398

a. Predictors: (Constant), SAP, AK, GG, KKD

b. Dependent Variable: AKPD

UJI HIPOTESIS

5. UJI STATISTIK T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.204	2.267		-.531	.599		
KKD	.284	.108	.299	2.619	.014	.160	6.240
GG	.174	.092	.153	1.895	.068	.322	3.107
AK	.341	.112	.365	3.050	.005	.146	6.850
SAP	.304	.100	.252	3.047	.005	.307	3.259

a. Dependent Variable: AKPD

6. UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.937	.929	1.140

7. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komitmen Kepala Daerah	35	31	48	39.94	4.511
Good Governance	35	32	49	39.37	3.758
Audit Kinerja	35	32	49	40.63	4.570
Standar Akuntansi	35	30	45	39.17	3.535
Pemerintah	35	33	50	42.74	4.273
Akuntabilitas Keuangan	35				
Pemerintah	35				
Valid N (listwise)	35				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	35	2	5	3.74	.741
X1.2	35	3	5	3.86	.772
X1.3	35	2	5	3.89	.867
X1.4	35	3	5	3.97	.822
X1.5	35	3	5	4.17	.747
X1.6	35	3	5	4.11	.832
X1.7	35	2	5	3.97	.954
X1.8	35	2	5	4.06	.873
X1.9	35	3	5	4.26	.780
X1.10	35	3	5	3.91	.702
SKOR_X1	35	31	48	39.94	4.511
X2.1	35	3	5	4.09	.702
X2.2	35	3	5	3.89	.718
X2.3	35	3	5	3.71	.789
X2.4	35	3	5	3.89	.796
X2.5	35	3	5	4.06	.765
X2.6	35	3	5	4.03	.822
X2.7	35	3	5	3.94	.873
X2.8	35	3	5	3.91	.742
X2.9	35	3	5	3.86	.733
X2.10	35	2	5	4.00	.767
SKOR_X2	35	32	49	39.37	3.758
X3.1	35	3	5	4.60	.604
X3.2	35	2	5	4.00	.907

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.3	35	2	5	3.83	.954
X3.4	35	2	5	3.83	.891
X3.5	35	2	5	3.94	.906
X3.6	35	2	5	3.89	.867
X3.7	35	2	5	3.86	.845
X3.8	35	3	5	3.97	.785
X3.9	35	3	5	4.49	.612
X3.10	35	3	5	4.23	.690
SKOR_X3	35	32	49	40.63	4.570
X4.1	35	2	5	4.14	.845
X4.2	35	2	5	4.20	.833
X4.3	35	3	5	4.46	.657
X4.4	35	3	5	4.34	.684
X4.5	35	3	5	4.37	.770
X4.6	35	3	5	4.34	.765
X4.7	35	3	5	4.69	.530
X4.8	35	3	5	4.34	.639
X4.9	35	3	5	4.29	.622
SKOR_X4	35	30	45	39.17	3.535
Y.1	35	3	5	4.20	.759
Y.2	35	3	5	4.23	.877
Y.3	35	2	5	4.29	.750
Y.4	35	3	5	4.29	.750
Y.5	35	3	5	4.43	.739
Y.6	35	3	5	4.23	.808
Y.7	35	3	5	4.37	.731
Y.8	35	3	5	4.34	.802
Y.9	35	3	5	4.46	.701
Y.10	35	2	5	3.91	.951
SKOR_Y	35	33	50	42.74	4.273
VALID N (LISTWISE)	35				